

RUDYCT ACADEMIC SERIES 2026

MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI INDONESIA

di Era Globalisasi Baru

Produktivitas • inovasi • keterbukaan strategis • ketahanan

Oleh:
Rudy C Tarumingkeng

www.rudycr.com/cv.pdf

Bogor, 21 Juli 2026

RUDYCT ACADEMIC SERIES 2026

MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI INDONESIA DI ERA GLOBALISASI BARU

Produktivitas • inovasi • keterbukaan strategis • ketahanan



Oleh

Rudy C Tarumingkeng

www.rudyct.com/cv.pdf

GLOBALISASI BARU

Abstrak

Artikel ini membahas strategi meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dalam globalisasi baru yang ditandai oleh fragmentasi geopolitik, proteksionisme, reorganisasi rantai pasok, kecerdasan artifisial, standar karbon, serta kompetisi memperebutkan investasi dan talenta. Daya saing dipahami bukan sebagai perlombaan menekan upah atau memberi insentif paling besar, melainkan kemampuan sistem ekonomi menghasilkan produktivitas, inovasi, pekerjaan bermutu, ketahanan, dan nilai tambah secara berkelanjutan. Indonesia mempunyai keunggulan berupa pasar domestik besar, sumber daya strategis, posisi maritim, bonus demografi, dan pengaruh ASEAN. Namun, keunggulan tersebut dibatasi oleh biaya logistik, kualitas pembelajaran, informalitas, kedalaman industri, lemahnya hubungan riset–bisnis, kapasitas fiskal, ketidakpastian regulasi, dan kesenjangan wilayah. Artikel ini menawarkan agenda daya saing sistemik yang mencakup stabilitas makro, industrialisasi berbasis kapabilitas, diversifikasi ekspor, penguatan SDM, digitalisasi dan AI, transisi hijau, pembiayaan produktif, reformasi institusi, serta diplomasi ekonomi. Kesimpulannya, Indonesia tidak perlu memilih antara keterbukaan dan kemandirian. Yang diperlukan ialah keterbukaan strategis: terhubung dengan pasar dan pengetahuan global sambil terus memperbesar kemampuan domestik, melindungi kepentingan publik, dan memperluas manfaat pertumbuhan.

Kata Kunci: daya saing; Indonesia; globalisasi baru; produktivitas; industri; perdagangan; inovasi; kecerdasan artifisial; ekonomi hijau; institusi.

Pendahuluan: Globalisasi Berubah, Strategi Harus Berubah

Globalisasi tidak berakhir, tetapi bentuknya berubah. Perdagangan, investasi, teknologi, data, energi, dan manusia tetap bergerak melintasi batas negara, sementara pertimbangan keamanan, geopolitik, iklim, serta ketahanan pasokan semakin menentukan arah pergerakannya. Perusahaan tidak lagi hanya mencari lokasi termurah; mereka menilai keandalan pemasok, stabilitas politik, jejak karbon, keamanan digital, ketersediaan talenta, dan akses ke beberapa pasar sekaligus. Pemerintah juga lebih aktif memakai subsidi, pembatasan ekspor, standar teknologi, dan kebijakan industri. Keadaan ini dapat disebut globalisasi baru: lebih terhubung secara digital, tetapi lebih terfragmentasi secara politik dan lebih ketat secara ekologis.

Bagi Indonesia, perubahan tersebut mengandung peluang besar. Negara ini merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, mempunyai pasar domestik luas, posisi di antara Samudra Hindia dan Pasifik, sumber mineral serta biodiversitas penting, dan basis manufaktur yang dapat diperluas. Pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,11 persen, ekspor yang tumbuh kuat, serta ketahanan konsumsi menunjukkan fondasi yang bernilai. Namun, ukuran pasar tidak otomatis menjadi daya saing. Pasar besar bahkan dapat mengurangi dorongan ekspor apabila perusahaan merasa cukup terlindungi di dalam negeri. Sumber daya alam juga dapat menciptakan rente apabila tidak diubah menjadi teknologi, pemasok, dan keterampilan.

Daya saing nasional perlu dibedakan dari daya saing harga jangka pendek. Depresiasi mata uang atau upah murah dapat menurunkan biaya ekspor, tetapi tidak menjamin produktivitas, inovasi, atau kesejahteraan. Daya saing yang sehat memungkinkan perusahaan membayar upah lebih tinggi karena menghasilkan nilai lebih besar. Ia lahir dari pekerja terampil, energi dan logistik andal, persaingan terbuka, pembiayaan yang sesuai, penelitian, kepastian hukum, serta pemerintahan yang mampu mengoordinasikan kepentingan. Dengan kata lain, unit analisisnya bukan hanya perusahaan, melainkan ekosistem.

Artikel ini menggunakan perspektif daya saing sistemik. Pada tingkat mikro, perusahaan harus memperbaiki teknologi, manajemen, kualitas, dan pemasaran. Pada tingkat meso, kluster industri, lembaga keterampilan, laboratorium, logistik, dan pembiayaan harus saling terhubung. Pada tingkat makro, stabilitas fiskal, moneter, dan eksternal harus dijaga. Pada tingkat meta, kepercayaan, meritokrasi, budaya inovasi, dan konsistensi kebijakan menentukan kemampuan masyarakat melakukan perubahan jangka panjang. Keempat tingkat ini tidak dapat digantikan satu sama lain.

1. Memaknai Negara Maju dan Jebakan Pendapatan Menengah

Tantangan utama bukan sekadar menaikkan pendapatan rata-rata, melainkan mengubah mesin pertumbuhan sebelum keunggulan upah murah dan komoditas kehilangan daya dorong. Indonesia telah naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah atas, tetapi produktivitas antarsektor sangat timpang. Sebagian perusahaan terhubung ke teknologi global, sementara banyak pekerja bertahan pada usaha mikro dengan modal, keterampilan, dan akses pasar terbatas. Dalam globalisasi baru, isu ini berkaitan langsung dengan fragmentasi perdagangan dan perebutan rantai pasok. Negara yang berhasil bukan selalu negara dengan sumber daya

paling banyak, tetapi negara yang paling cepat menggabungkan pengetahuan, organisasi, infrastruktur, dan kepercayaan menjadi kemampuan produksi yang sulit ditiru.

Posisi Indonesia harus dibaca melalui peluang sekaligus kesenjangan kapabilitas. Strategi keluar dari jebakan pendapatan menengah harus menggabungkan produktivitas perusahaan, peningkatan keterampilan, persaingan sehat, adopsi teknologi, dan kemampuan ekspor. Kebijakan industri perlu memilih kemampuan yang ingin dibangun, bukan hanya produk yang ingin dibuat. Kebijakan publik perlu mengurangi biaya koordinasi yang tidak dapat diselesaikan perusahaan secara individual, namun tetap menjaga tekanan persaingan. Dukungan tanpa persaingan menghasilkan rente; persaingan tanpa pembangunan kemampuan membuat pelaku domestik tertinggal.

Ilustrasinya dapat dilihat pada situasi berikut. Bayangkan dua kabupaten penghasil mineral. Kabupaten pertama hanya menikmati ledakan penerimaan dan konsumsi; kabupaten kedua menanam pendapatan pada politeknik, pemasok lokal, laboratorium material, dan logistik. Dua dekade kemudian, hanya kabupaten kedua memiliki basis produktif yang bertahan ketika harga komoditas turun. Kasus ini menegaskan bahwa investasi dan perdagangan tidak otomatis membawa transfer teknologi. Pembelajaran terjadi bila tenaga lokal terlibat, pemasok memenuhi standar, lembaga riset memecahkan masalah, dan insentif pemerintah dikaitkan dengan hasil yang dapat diaudit.

Risiko strategis harus dikelola secara terbuka. Bahaya terbesar ialah merasa bahwa pasar besar dan sumber daya alam otomatis menjamin status maju. Proteksi yang terlalu lama, rente perizinan, dan subsidi tanpa disiplin kinerja dapat mempertahankan perusahaan yang tidak inovatif. Dalam lingkungan global yang berubah cepat, kebijakan harus mempunyai batas waktu, uji manfaat-biaya, stress test, dan klausul penyesuaian. Kepastian tidak berarti aturan tidak pernah berubah; kepastian berarti perubahan mempunyai dasar, proses, jadwal, dan masa transisi yang jelas.

Kinerja perlu diukur melalui produktivitas tenaga kerja, kompleksitas ekspor, kontribusi manufaktur, jumlah perusahaan yang naik kelas, dan pertumbuhan upah riil. Ukuran itu harus dibandingkan dengan pesaing relevan, dipilah menurut wilayah dan ukuran perusahaan, serta dilengkapi pengalaman pengguna layanan. Peringkat internasional dapat menjadi sinyal, tetapi keputusan tidak boleh diarahkan hanya untuk mempercantik posisi. Tujuan akhirnya ialah produktivitas, nilai tambah, pekerjaan bermutu, ketahanan, dan kesejahteraan.

Dari sudut manajemen strategis, agenda ini memerlukan keselarasan antara tujuan nasional dan keputusan organisasi. Pemerintah menetapkan arah serta barang publik; perusahaan melakukan inovasi dan investasi; lembaga pendidikan membangun kompetensi; pemerintah daerah mengembangkan klaster; dan masyarakat menjaga akuntabilitas. Keunggulan kompetitif Indonesia akan muncul dari kualitas hubungan di antara aktor tersebut, bukan dari satu proyek unggulan.

2. Aritmetika Pertumbuhan dan Mutu Ekspansi Ekonomi

Sasaran pendapatan 2045 membutuhkan pertumbuhan lebih cepat daripada lintasan historis, tetapi percepatan yang rapuh justru dapat menciptakan krisis dan kemunduran. Pertumbuhan sekitar lima persen telah menjaga stabilitas, namun kenaikan menuju kisaran yang lebih tinggi menuntut investasi produktif dan peningkatan total factor productivity. IMF memproyeksikan stabilitas jangka dekat, sekaligus mengingatkan risiko eksternal dan perlunya reformasi

struktural. Dalam globalisasi baru, isu ini berkaitan langsung dengan standar produktivitas dan kualitas internasional. Negara yang berhasil bukan selalu negara dengan sumber daya paling banyak, tetapi negara yang paling cepat menggabungkan pengetahuan, organisasi, infrastruktur, dan kepercayaan menjadi kemampuan produksi yang sulit ditiru.

Posisi Indonesia harus dibaca melalui peluang sekaligus kesenjangan kapabilitas. Pemerintah perlu membedakan stimulus siklus dengan kapasitas pertumbuhan potensial. Belanja infrastruktur harus dipilih berdasarkan manfaat ekonomi, pendidikan harus menghasilkan pembelajaran, dan insentif investasi harus dikaitkan dengan teknologi, pemasok lokal, ekspor, serta pelatihan pekerja. Kebijakan publik perlu mengurangi biaya koordinasi yang tidak dapat diselesaikan perusahaan secara individual, namun tetap menjaga tekanan persaingan. Dukungan tanpa persaingan menghasilkan rente; persaingan tanpa pembangunan kemampuan membuat pelaku domestik tertinggal.

Ilustrasinya dapat dilihat pada situasi berikut. Sebuah kawasan industri dapat menaikkan PDB ketika dibangun, tetapi dampak jangka panjang bergantung pada keterhubungan pelabuhan, kompetensi pekerja, pasokan energi, integrasi UMKM, dan kemampuan perusahaan melakukan riset. Beton adalah input; produktivitas merupakan hasil yang harus dibuktikan. Kasus ini menegaskan bahwa investasi dan perdagangan tidak otomatis membawa transfer teknologi. Pembelajaran terjadi bila tenaga lokal terlibat, pemasok memenuhi standar, lembaga riset memecahkan masalah, dan insentif pemerintah dikaitkan dengan hasil yang dapat diaudit.

Risiko strategis harus dikelola secara terbuka. Target angka yang terlalu dominan dapat mendorong proyek besar berimbal hasil rendah, ekspansi kredit yang tidak hati-hati, atau pelemahan standar lingkungan. Sebaliknya, kehati-hatian yang pasif dapat membuat momentum demografi terlewat. Dalam lingkungan global yang berubah cepat, kebijakan harus mempunyai batas waktu, uji manfaat-biaya, stress test, dan klausul penyesuaian. Kepastian tidak berarti aturan tidak pernah berubah; kepastian berarti perubahan mempunyai dasar, proses, jadwal, dan masa transisi yang jelas.

Kinerja perlu diukur melalui pertumbuhan PDB riil per kapita, produktivitas total faktor, incremental capital-output ratio, investasi swasta, dan stabilitas inflasi serta transaksi berjalan. Ukuran itu harus dibandingkan dengan pesaing relevan, dipilah menurut wilayah dan ukuran perusahaan, serta dilengkapi pengalaman pengguna layanan. Peringkat internasional dapat menjadi sinyal, tetapi keputusan tidak boleh diarahkan hanya untuk mempercantik posisi. Tujuan akhirnya ialah produktivitas, nilai tambah, pekerjaan bermutu, ketahanan, dan kesejahteraan.

Dari sudut manajemen strategis, agenda ini memerlukan keselarasan antara tujuan nasional dan keputusan organisasi. Pemerintah menetapkan arah serta barang publik; perusahaan melakukan inovasi dan investasi; lembaga pendidikan membangun kompetensi; pemerintah daerah mengembangkan klaster; dan masyarakat menjaga akuntabilitas. Keunggulan kompetitif Indonesia akan muncul dari kualitas hubungan di antara aktor tersebut, bukan dari satu proyek unggulan.

3. Transformasi Struktural: Dari Komoditas ke Nilai Tambah

Hilirisasi penting, tetapi negara maju lahir ketika pengolahan bahan baku berkembang menjadi ekosistem desain, rekayasa, mesin, jasa bisnis, dan inovasi. Kekayaan mineral, perkebunan, kehutanan, pertanian, serta sumber daya laut memberi Indonesia basis industrialisasi.

Masalahnya, rantai nilai sering terputus: teknologi inti diimpor, penelitian lokal lemah, dan hubungan antara perusahaan besar dengan pemasok domestik terbatas. Dalam globalisasi baru, isu ini berkaitan langsung dengan pergeseran dari komoditas menuju kapabilitas. Negara yang berhasil bukan selalu negara dengan sumber daya paling banyak, tetapi negara yang paling cepat menggabungkan pengetahuan, organisasi, infrastruktur, dan kepercayaan menjadi kemampuan produksi yang sulit ditiru.

Posisi Indonesia harus dibaca melalui peluang sekaligus kesenjangan kapabilitas. Hilirisasi generasi kedua harus mengembangkan standardisasi, rekayasa proses, sertifikasi, industri komponen, daur ulang, dan kemampuan pemasaran global. Universitas dan politeknik di wilayah produksi perlu menjadi bagian dari klaster, bukan lembaga yang berdiri jauh dari kebutuhan industri. Kebijakan publik perlu mengurangi biaya koordinasi yang tidak dapat diselesaikan perusahaan secara individual, namun tetap menjaga tekanan persaingan. Dukungan tanpa persaingan menghasilkan rente; persaingan tanpa pembangunan kemampuan membuat pelaku domestik tertinggal.

Ilustrasinya dapat dilihat pada situasi berikut. Dalam rantai baterai, keberhasilan bukan semata-mata jumlah smelter. Ukuran yang lebih bermakna ialah kemampuan memproduksi material maju, sistem manajemen baterai, perangkat lunak, kendaraan, layanan penyimpanan energi, serta pemulihan mineral melalui ekonomi sirkular. Kasus ini menegaskan bahwa investasi dan perdagangan tidak otomatis membawa transfer teknologi. Pembelajaran terjadi bila tenaga lokal terlibat, pemasok memenuhi standar, lembaga riset memecahkan masalah, dan insentif pemerintah dikaitkan dengan hasil yang dapat diaudit.

Risiko strategis harus dikelola secara terbuka. Ketergantungan pada satu komoditas menciptakan kerentanan harga, konflik lahan, dan tekanan ekologis. Larangan ekspor tanpa peningkatan teknologi dapat memindahkan nilai tambah hanya satu tahap, sementara keuntungan terbesar tetap berada pada pemilik pengetahuan dan merek. Dalam lingkungan global yang berubah cepat, kebijakan harus mempunyai batas waktu, uji manfaat-biaya, stress test, dan klausul penyesuaian. Kepastian tidak berarti aturan tidak pernah berubah; kepastian berarti perubahan mempunyai dasar, proses, jadwal, dan masa transisi yang jelas.

Kinerja perlu diukur melalui nilai tambah domestik dalam ekspor, kedalaman pemasok, belanja penelitian industri, intensitas teknologi, diversifikasi produk, dan kepatuhan lingkungan. Ukuran itu harus dibandingkan dengan pesaing relevan, dipilah menurut wilayah dan ukuran perusahaan, serta dilengkapi pengalaman pengguna layanan. Peringkat internasional dapat menjadi sinyal, tetapi keputusan tidak boleh diarahkan hanya untuk mempercantik posisi. Tujuan akhirnya ialah produktivitas, nilai tambah, pekerjaan bermutu, ketahanan, dan kesejahteraan.

Dari sudut manajemen strategis, agenda ini memerlukan keselarasan antara tujuan nasional dan keputusan organisasi. Pemerintah menetapkan arah serta barang publik; perusahaan melakukan inovasi dan investasi; lembaga pendidikan membangun kompetensi; pemerintah daerah mengembangkan klaster; dan masyarakat menjaga akuntabilitas. Keunggulan kompetitif Indonesia akan muncul dari kualitas hubungan di antara aktor tersebut, bukan dari satu proyek unggulan.

4. Manufaktur Modern dan Kebijakan Industri yang Disiplin

Manufaktur tetap strategis karena menggabungkan skala, pembelajaran, ekspor, dan pekerjaan produktif, tetapi kebijakan industri harus transparan dan berbasis hasil. Deindustrialisasi dini dapat terjadi ketika kontribusi manufaktur melemah sebelum pendapatan tinggi tercapai. Pada saat yang sama, otomatisasi mengurangi keunggulan tenaga kerja murah dan kebijakan hijau global mengubah standar perdagangan. Dalam globalisasi baru, isu ini berkaitan langsung dengan kebijakan industri negara-negara besar. Negara yang berhasil bukan selalu negara dengan sumber daya paling banyak, tetapi negara yang paling cepat menggabungkan pengetahuan, organisasi, infrastruktur, dan kepercayaan menjadi kemampuan produksi yang sulit ditiru.

Posisi Indonesia harus dibaca melalui peluang sekaligus kesenjangan kapabilitas. Indonesia perlu memilih portofolio industri yang memadukan kekuatan yang sudah ada dengan peluang baru: agroindustri, kimia dan material, alat kesehatan, elektronik, kendaraan rendah emisi, ekonomi maritim, serta jasa digital untuk manufaktur. Dukungan negara harus memiliki batas waktu dan tolok ukur. Kebijakan publik perlu mengurangi biaya koordinasi yang tidak dapat diselesaikan perusahaan secara individual, namun tetap menjaga tekanan persaingan. Dukungan tanpa persaingan menghasilkan rente; persaingan tanpa pembangunan kemampuan membuat pelaku domestik tertinggal.

Ilustrasinya dapat dilihat pada situasi berikut. Insentif pajak kepada sebuah pabrik semestinya disertai perjanjian pelatihan, target ekspor, transfer pengetahuan yang realistis, audit manfaat, dan mekanisme penghentian apabila janji tidak dipenuhi. Dengan demikian, masyarakat membeli pembelajaran, bukan sekadar kapasitas produksi. Kasus ini menegaskan bahwa investasi dan perdagangan tidak otomatis membawa transfer teknologi. Pembelajaran terjadi bila tenaga lokal terlibat, pemasok memenuhi standar, lembaga riset memecahkan masalah, dan insentif pemerintah dikaitkan dengan hasil yang dapat diaudit.

Risiko strategis harus dikelola secara terbuka. Kebijakan yang dinegosiasikan secara tertutup rawan ditangkap kelompok berkepentingan. Tingkat kandungan lokal yang kaku dapat menaikkan biaya tanpa menciptakan kemampuan; sebaliknya, keterbukaan tanpa strategi dapat membuat industri lokal hanya menjadi pasar. Dalam lingkungan global yang berubah cepat, kebijakan harus mempunyai batas waktu, uji manfaat-biaya, stress test, dan klausul penyesuaian. Kepastian tidak berarti aturan tidak pernah berubah; kepastian berarti perubahan mempunyai dasar, proses, jadwal, dan masa transisi yang jelas.

Kinerja perlu diukur melalui pangsa manufaktur dalam PDB dan ekspor, produktivitas pabrik, ekspor berteknologi menengah-tinggi, intensitas energi, serta kualitas pekerjaan formal. Ukuran itu harus dibandingkan dengan pesaing relevan, dipilah menurut wilayah dan ukuran perusahaan, serta dilengkapi pengalaman pengguna layanan. Peringkat internasional dapat menjadi sinyal, tetapi keputusan tidak boleh diarahkan hanya untuk mempercantik posisi. Tujuan akhirnya ialah produktivitas, nilai tambah, pekerjaan bermutu, ketahanan, dan kesejahteraan.

Dari sudut manajemen strategis, agenda ini memerlukan keselarasan antara tujuan nasional dan keputusan organisasi. Pemerintah menetapkan arah serta barang publik; perusahaan melakukan inovasi dan investasi; lembaga pendidikan membangun kompetensi; pemerintah daerah mengembangkan klaster; dan masyarakat menjaga akuntabilitas.

Keunggulan kompetitif Indonesia akan muncul dari kualitas hubungan di antara aktor tersebut, bukan dari satu proyek unggulan.

5. Modal Manusia: Dari Lama Sekolah ke Kemampuan Nyata

Bonus demografi hanya menjadi dividen apabila anak tumbuh sehat, benar-benar belajar, dan memperoleh keterampilan yang relevan sepanjang kehidupan kerja. Ekspansi akses pendidikan merupakan pencapaian besar, tetapi perbedaan mutu antarsekolah dan antardaerah tetap lebar. Gelar tidak selalu mencerminkan literasi, numerasi, kemampuan digital, penalaran, komunikasi, dan etika profesional yang dibutuhkan ekonomi modern. Dalam globalisasi baru, isu ini berkaitan langsung dengan kompetisi talenta dan pembelajaran. Negara yang berhasil bukan selalu negara dengan sumber daya paling banyak, tetapi negara yang paling cepat menggabungkan pengetahuan, organisasi, infrastruktur, dan kepercayaan menjadi kemampuan produksi yang sulit ditiru.

Posisi Indonesia harus dibaca melalui peluang sekaligus kesenjangan kapabilitas. Reformasi harus dimulai dari gizi ibu-anak, pendidikan usia dini, kompetensi guru, kepemimpinan sekolah, dan asesmen diagnostik. Pendidikan vokasi perlu dibangun bersama industri, sedangkan universitas harus mengintegrasikan pengajaran, penelitian, kewirausahaan, dan pemecahan masalah daerah. Kebijakan publik perlu mengurangi biaya koordinasi yang tidak dapat diselesaikan perusahaan secara individual, namun tetap menjaga tekanan persaingan. Dukungan tanpa persaingan menghasilkan rente; persaingan tanpa pembangunan kemampuan membuat pelaku domestik tertinggal.

Ilustrasinya dapat dilihat pada situasi berikut. Seorang siswa di wilayah kepulauan seharusnya dapat mengakses guru berkualitas melalui model hibrida, berlatih di laboratorium bergerak, memperoleh mentor industri, dan membangun portofolio proyek lokal. Teknologi memperluas kesempatan, tetapi hubungan manusia tetap menjadi inti pembelajaran. Kasus ini menegaskan bahwa investasi dan perdagangan tidak otomatis membawa transfer teknologi. Pembelajaran terjadi bila tenaga lokal terlibat, pemasok memenuhi standar, lembaga riset memecahkan masalah, dan insentif pemerintah dikaitkan dengan hasil yang dapat diaudit.

Risiko strategis harus dikelola secara terbuka. Program pendidikan mudah terjebak pada belanja sarana, perubahan kurikulum berulang, atau sertifikasi administratif. Teknologi pendidikan juga dapat memperlebar kesenjangan ketika perangkat tersedia tetapi pedagogi, konektivitas, dan dukungan guru tidak memadai. Dalam lingkungan global yang berubah cepat, kebijakan harus mempunyai batas waktu, uji manfaat-biaya, stress test, dan klausul penyesuaian. Kepastian tidak berarti aturan tidak pernah berubah; kepastian berarti perubahan mempunyai dasar, proses, jadwal, dan masa transisi yang jelas.

Kinerja perlu diukur melalui hasil belajar, stunting, transisi sekolah-ke-kerja, partisipasi pelatihan dewasa, produktivitas lulusan, dan kesenjangan capaian antardaerah. Ukuran itu harus dibandingkan dengan pesaing relevan, dipilih menurut wilayah dan ukuran perusahaan, serta dilengkapi pengalaman pengguna layanan. Peringkat internasional dapat menjadi sinyal, tetapi keputusan tidak boleh diarahkan hanya untuk mempercantik posisi. Tujuan akhirnya ialah produktivitas, nilai tambah, pekerjaan bermutu, ketahanan, dan kesejahteraan.

Dari sudut manajemen strategis, agenda ini memerlukan keselarasan antara tujuan nasional dan keputusan organisasi. Pemerintah menetapkan arah serta barang publik; perusahaan melakukan inovasi dan investasi; lembaga pendidikan membangun kompetensi; pemerintah daerah mengembangkan klaster; dan masyarakat menjaga akuntabilitas. Keunggulan kompetitif Indonesia akan muncul dari kualitas hubungan di antara aktor tersebut, bukan dari satu proyek unggulan.

6. Kesehatan, Gizi, dan Produktivitas Sepanjang Hayat

Kesehatan bukan beban konsumtif, melainkan fondasi produktivitas, ketahanan rumah tangga, dan kapasitas belajar. Beban penyakit Indonesia bersifat ganda: masalah gizi dan penyakit menular belum sepenuhnya selesai, sementara penyakit tidak menular, kesehatan mental, polusi, dan penuaan penduduk meningkat. Biaya kesehatan yang terlambat ditangani mengurangi tabungan dan partisipasi kerja. Dalam globalisasi baru, isu ini berkaitan langsung dengan ketahanan kesehatan dan mobilitas manusia. Negara yang berhasil bukan selalu negara dengan sumber daya paling banyak, tetapi negara yang paling cepat menggabungkan pengetahuan, organisasi, infrastruktur, dan kepercayaan menjadi kemampuan produksi yang sulit ditiru.

Posisi Indonesia harus dibaca melalui peluang sekaligus kesenjangan kapabilitas. Penguatan layanan primer, promotif-preventif, surveilans, air bersih, sanitasi, keselamatan kerja, dan sistem rujukan harus berjalan bersama perlindungan finansial. Program gizi perlu memakai standar mutu, pengadaan transparan, data penerima yang baik, serta evaluasi dampak biologis dan pendidikan. Kebijakan publik perlu mengurangi biaya koordinasi yang tidak dapat diselesaikan perusahaan secara individual, namun tetap menjaga tekanan persaingan. Dukungan tanpa persaingan menghasilkan rente; persaingan tanpa pembangunan kemampuan membuat pelaku domestik tertinggal.

Ilustrasinya dapat dilihat pada situasi berikut. Puskesmas yang terhubung dengan sekolah, tempat kerja, dan sistem data dapat mendeteksi hipertensi, anemia, atau gangguan tumbuh-kembang lebih awal. Pencegahan yang murah pada hari ini menghindari kehilangan produktivitas yang mahal pada masa depan. Kasus ini menegaskan bahwa investasi dan perdagangan tidak otomatis membawa transfer teknologi. Pembelajaran terjadi bila tenaga lokal terlibat, pemasok memenuhi standar, lembaga riset memecahkan masalah, dan insentif pemerintah dikaitkan dengan hasil yang dapat diaudit.

Risiko strategis harus dikelola secara terbuka. Ekspansi layanan tanpa tenaga kesehatan, obat, dan tata kelola dapat meningkatkan antrean tanpa memperbaiki hasil. Program besar juga berisiko menjadi sekadar distribusi anggaran apabila keamanan pangan dan akuntabilitas lemah. Dalam lingkungan global yang berubah cepat, kebijakan harus mempunyai batas waktu, uji manfaat-biaya, stress test, dan klausul penyesuaian. Kepastian tidak berarti aturan tidak pernah berubah; kepastian berarti perubahan mempunyai dasar, proses, jadwal, dan masa transisi yang jelas.

Kinerja perlu diukur melalui harapan hidup sehat, stunting dan anemia, kematian ibu, pengeluaran kesehatan katastrofik, cakupan layanan primer, serta hari kerja yang hilang. Ukuran itu harus dibandingkan dengan pesaing relevan, dipilah menurut wilayah dan ukuran perusahaan, serta dilengkapi pengalaman pengguna layanan. Peringkat internasional dapat menjadi sinyal, tetapi keputusan tidak boleh diarahkan hanya untuk mempercantik posisi.

Tujuan akhirnya ialah produktivitas, nilai tambah, pekerjaan bermutu, ketahanan, dan kesejahteraan.

Dari sudut manajemen strategis, agenda ini memerlukan keselarasan antara tujuan nasional dan keputusan organisasi. Pemerintah menetapkan arah serta barang publik; perusahaan melakukan inovasi dan investasi; lembaga pendidikan membangun kompetensi; pemerintah daerah mengembangkan klaster; dan masyarakat menjaga akuntabilitas. Keunggulan kompetitif Indonesia akan muncul dari kualitas hubungan di antara aktor tersebut, bukan dari satu proyek unggulan.

7. Pasar Kerja, Informalitas, dan Kelas Menengah Produktif

Kemajuan harus tercermin pada perpindahan pekerja ke pekerjaan yang lebih aman, produktif, dan memberi peluang peningkatan keterampilan. Sebagian besar tenaga kerja masih berada dalam informalitas atau usaha berskala sangat kecil. Fleksibilitas sektor ini menahan pengangguran, tetapi pendapatan tidak stabil, perlindungan sosial terbatas, dan akses pembiayaan serta teknologi rendah. Dalam globalisasi baru, isu ini berkaitan langsung dengan platform kerja serta rantai nilai jasa. Negara yang berhasil bukan selalu negara dengan sumber daya paling banyak, tetapi negara yang paling cepat menggabungkan pengetahuan, organisasi, infrastruktur, dan kepercayaan menjadi kemampuan produksi yang sulit ditiru.

Posisi Indonesia harus dibaca melalui peluang sekaligus kesenjangan kapabilitas. Reformasi pasar kerja perlu menyeimbangkan perlindungan dan mobilitas. Jaminan sosial harus portabel, pelatihan berbasis permintaan, layanan penempatan kerja berbasis data, dan regulasi usaha dibuat sederhana. Kebijakan keluarga—pengasuhan anak, transportasi aman, dan fleksibilitas—dapat meningkatkan partisipasi perempuan. Kebijakan publik perlu mengurangi biaya koordinasi yang tidak dapat diselesaikan perusahaan secara individual, namun tetap menjaga tekanan persaingan. Dukungan tanpa persaingan menghasilkan rente; persaingan tanpa pembangunan kemampuan membuat pelaku domestik tertinggal.

Ilustrasinya dapat dilihat pada situasi berikut. Pedagang kecil yang masuk platform digital belum tentu naik kelas jika margin ditekan dan data dikuasai platform. Naik kelas terjadi ketika ia memperoleh pembukuan, kredit yang sesuai, perlindungan sosial, standar produk, serta akses langsung ke pasar yang lebih luas. Kasus ini menegaskan bahwa investasi dan perdagangan tidak otomatis membawa transfer teknologi. Pembelajaran terjadi bila tenaga lokal terlibat, pemasok memenuhi standar, lembaga riset memecahkan masalah, dan insentif pemerintah dikaitkan dengan hasil yang dapat diaudit.

Risiko strategis harus dikelola secara terbuka. Formalisasi yang hanya menambah biaya mendorong usaha tetap bersembunyi. Deregulasi yang mengabaikan keselamatan dan posisi tawar pekerja dapat menghasilkan pertumbuhan tanpa rasa aman serta memperlemah permintaan domestik. Dalam lingkungan global yang berubah cepat, kebijakan harus mempunyai batas waktu, uji manfaat-biaya, stress test, dan klausul penyesuaian. Kepastian tidak berarti aturan tidak pernah berubah; kepastian berarti perubahan mempunyai dasar, proses, jadwal, dan masa transisi yang jelas.

Kinerja perlu diukur melalui upah riil median, pekerja formal, produktivitas UMKM, partisipasi perempuan, cakupan jaminan sosial, dan mobilitas pendapatan. Ukuran itu harus dibandingkan dengan pesaing relevan, dipilah menurut wilayah dan ukuran perusahaan, serta dilengkapi pengalaman pengguna layanan. Peringkat internasional dapat menjadi sinyal, tetapi

keputusan tidak boleh diarahkan hanya untuk mempercantik posisi. Tujuan akhirnya ialah produktivitas, nilai tambah, pekerjaan bermutu, ketahanan, dan kesejahteraan.

Dari sudut manajemen strategis, agenda ini memerlukan keselarasan antara tujuan nasional dan keputusan organisasi. Pemerintah menetapkan arah serta barang publik; perusahaan melakukan inovasi dan investasi; lembaga pendidikan membangun kompetensi; pemerintah daerah mengembangkan klaster; dan masyarakat menjaga akuntabilitas. Keunggulan kompetitif Indonesia akan muncul dari kualitas hubungan di antara aktor tersebut, bukan dari satu proyek unggulan.

8. Ekonomi Digital, AI, dan Kedaulatan Kapabilitas

Digitalisasi menjadi mesin kemajuan hanya apabila menaikkan produktivitas sektor riil dan kemampuan manusia, bukan sekadar memperbesar konsumsi aplikasi. Indonesia memiliki basis pengguna digital besar, sistem pembayaran berkembang, dan ekosistem perusahaan rintisan. Namun, ketergantungan pada perangkat, komputasi, platform, serta talenta asing dapat membatasi nilai tambah domestik. AI memperbesar peluang sekaligus risiko konsentrasi. Dalam globalisasi baru, isu ini berkaitan langsung dengan kecerdasan artifisial dan kedaulatan data. Negara yang berhasil bukan selalu negara dengan sumber daya paling banyak, tetapi negara yang paling cepat menggabungkan pengetahuan, organisasi, infrastruktur, dan kepercayaan menjadi kemampuan produksi yang sulit ditiru.

Posisi Indonesia harus dibaca melalui peluang sekaligus kesenjangan kapabilitas. Prioritas meliputi konektivitas bermutu, pusat data efisien, komputasi untuk riset, interoperabilitas data pemerintah, keamanan siber, identitas digital, dan pengembangan talenta. Adopsi AI pada pertanian, manufaktur, kesehatan, pendidikan, logistik, dan layanan publik harus diukur melalui hasil. Kebijakan publik perlu mengurangi biaya koordinasi yang tidak dapat diselesaikan perusahaan secara individual, namun tetap menjaga tekanan persaingan. Dukungan tanpa persaingan menghasilkan rente; persaingan tanpa pembangunan kemampuan membuat pelaku domestik tertinggal.

Ilustrasinya dapat dilihat pada situasi berikut. AI untuk petani bukan sekadar chatbot. Nilainya muncul bila ramalan cuaca, citra lahan, harga pasar, kredit, asuransi, dan penyuluh terintegrasi sehingga keputusan tanam membaik. Sistem harus dapat dijelaskan dalam bahasa lokal dan tetap menyediakan jalur bantuan manusia. Kasus ini menegaskan bahwa investasi dan perdagangan tidak otomatis membawa transfer teknologi. Pembelajaran terjadi bila tenaga lokal terlibat, pemasok memenuhi standar, lembaga riset memecahkan masalah, dan insentif pemerintah dikaitkan dengan hasil yang dapat diaudit.

Risiko strategis harus dikelola secara terbuka. Otomasi dapat menggeser tugas rutin dan memperlebar kesenjangan keterampilan. Pengawasan massal, diskriminasi algoritmik, kebocoran data, serta monopoli platform mengancam kepercayaan. Regulasi harus adaptif tetapi tegas terhadap risiko tinggi. Dalam lingkungan global yang berubah cepat, kebijakan harus mempunyai batas waktu, uji manfaat-biaya, stress test, dan klausul penyesuaian. Kepastian tidak berarti aturan tidak pernah berubah; kepastian berarti perubahan mempunyai dasar, proses, jadwal, dan masa transisi yang jelas.

Kinerja perlu diukur melalui produktivitas perusahaan pengguna digital, kontribusi jasa digital ekspor, talenta AI, insiden siber, kesenjangan konektivitas, dan konsentrasi pasar platform. Ukuran itu harus dibandingkan dengan pesaing relevan, dipilah menurut wilayah dan

ukuran perusahaan, serta dilengkapi pengalaman pengguna layanan. Peringkat internasional dapat menjadi sinyal, tetapi keputusan tidak boleh diarahkan hanya untuk mempercantik posisi. Tujuan akhirnya ialah produktivitas, nilai tambah, pekerjaan bermutu, ketahanan, dan kesejahteraan.

Dari sudut manajemen strategis, agenda ini memerlukan keselarasan antara tujuan nasional dan keputusan organisasi. Pemerintah menetapkan arah serta barang publik; perusahaan melakukan inovasi dan investasi; lembaga pendidikan membangun kompetensi; pemerintah daerah mengembangkan klaster; dan masyarakat menjaga akuntabilitas. Keunggulan kompetitif Indonesia akan muncul dari kualitas hubungan di antara aktor tersebut, bukan dari satu proyek unggulan.

9. Riset, Inovasi, dan Hubungan Universitas–Industri

Negara maju tidak hanya memakai teknologi; ia mampu memahami, mengadaptasi, memperbaiki, dan menciptakannya. Belanja penelitian Indonesia masih terbatas dan tersebar, sedangkan hubungan antara laboratorium, industri, pemerintah, dan modal ventura belum matang. Banyak hasil riset berhenti pada publikasi atau prototipe karena tidak melewati tahap standardisasi dan komersialisasi. Dalam globalisasi baru, isu ini berkaitan langsung dengan ekosistem riset lintas batas. Negara yang berhasil bukan selalu negara dengan sumber daya paling banyak, tetapi negara yang paling cepat menggabungkan pengetahuan, organisasi, infrastruktur, dan kepercayaan menjadi kemampuan produksi yang sulit ditiru.

Posisi Indonesia harus dibaca melalui peluang sekaligus kesenjangan kapabilitas. Pendanaan perlu bersifat multi-tahun dan kompetitif, disertai misi nasional yang jelas. Kantor transfer teknologi, laboratorium bersama, pengadaan pemerintah inovatif, dana pembuktian konsep, dan mobilitas peneliti-industri dapat menjembatani lembah antara pengetahuan dan pasar. Kebijakan publik perlu mengurangi biaya koordinasi yang tidak dapat diselesaikan perusahaan secara individual, namun tetap menjaga tekanan persaingan. Dukungan tanpa persaingan menghasilkan rente; persaingan tanpa pembangunan kemampuan membuat pelaku domestik tertinggal.

Ilustrasinya dapat dilihat pada situasi berikut. Konsorsium untuk benih tahan iklim dapat menggabungkan ahli genetika, petani, perusahaan benih, pemerintah daerah, dan pembeli pangan. Keberhasilan diukur dari produktivitas lahan dan pendapatan petani, bukan jumlah rapat atau laporan. Kasus ini menegaskan bahwa investasi dan perdagangan tidak otomatis membawa transfer teknologi. Pembelajaran terjadi bila tenaga lokal terlibat, pemasok memenuhi standar, lembaga riset memecahkan masalah, dan insentif pemerintah dikaitkan dengan hasil yang dapat diaudit.

Risiko strategis harus dikelola secara terbuka. Target paten atau publikasi yang mekanis mendorong kuantitas tanpa dampak. Misi yang terlalu luas mengencerkan sumber daya, sedangkan pilihan teknologi yang politis dapat mengunci investasi pada arah yang salah. Dalam lingkungan global yang berubah cepat, kebijakan harus mempunyai batas waktu, uji manfaat-biaya, stress test, dan klausul penyesuaian. Kepastian tidak berarti aturan tidak pernah berubah; kepastian berarti perubahan mempunyai dasar, proses, jadwal, dan masa transisi yang jelas.

Kinerja perlu diukur melalui belanja R&D, peneliti per sejuta penduduk, kolaborasi industri-universitas, pendapatan lisensi, produk baru, dan dampak misi inovasi. Ukuran itu harus dibandingkan dengan pesaing relevan, dipilah menurut wilayah dan ukuran perusahaan, serta

dilengkapi pengalaman pengguna layanan. Peringkat internasional dapat menjadi sinyal, tetapi keputusan tidak boleh diarahkan hanya untuk mempercantik posisi. Tujuan akhirnya ialah produktivitas, nilai tambah, pekerjaan bermutu, ketahanan, dan kesejahteraan.

Dari sudut manajemen strategis, agenda ini memerlukan keselarasan antara tujuan nasional dan keputusan organisasi. Pemerintah menetapkan arah serta barang publik; perusahaan melakukan inovasi dan investasi; lembaga pendidikan membangun kompetensi; pemerintah daerah mengembangkan klaster; dan masyarakat menjaga akuntabilitas. Keunggulan kompetitif Indonesia akan muncul dari kualitas hubungan di antara aktor tersebut, bukan dari satu proyek unggulan.

10. Pangan, Pertanian Modern, dan Ekonomi Perdesaan

Ketahanan pangan yang berkelanjutan lahir dari produktivitas, diversifikasi, logistik, dan pendapatan petani, bukan dari swasembada setiap komoditas dengan biaya apa pun. Pertanian tetap penting bagi pekerjaan, harga pangan, kemiskinan, dan stabilitas sosial. Tantangannya mencakup lahan sempit, penuaan petani, kehilangan pascapanen, perubahan iklim, air, akses benih, serta rantai perdagangan panjang. Dalam globalisasi baru, isu ini berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan volatilitas harga. Negara yang berhasil bukan selalu negara dengan sumber daya paling banyak, tetapi negara yang paling cepat menggabungkan pengetahuan, organisasi, infrastruktur, dan kepercayaan menjadi kemampuan produksi yang sulit ditiru.

Posisi Indonesia harus dibaca melalui peluang sekaligus kesenjangan kapabilitas. Konsolidasi layanan dan usaha, mekanisasi yang sesuai skala, riset benih, irigasi presisi, penyimpanan dingin, asuransi, pembiayaan, dan data lahan perlu disatukan. Agroindustri perdesaan dapat menahan nilai tambah di lokasi produksi. Kebijakan publik perlu mengurangi biaya koordinasi yang tidak dapat diselesaikan perusahaan secara individual, namun tetap menjaga tekanan persaingan. Dukungan tanpa persaingan menghasilkan rente; persaingan tanpa pembangunan kemampuan membuat pelaku domestik tertinggal.

Ilustrasinya dapat dilihat pada situasi berikut. Koperasi hortikultura yang memiliki kontrak pembelian, rumah kemas, pendingin, standar mutu, dan informasi cuaca lebih mampu mengurangi kehilangan dibanding bantuan alat yang berdiri sendiri. Kelembagaan mengubah teknologi menjadi produktivitas. Kasus ini menegaskan bahwa investasi dan perdagangan tidak otomatis membawa transfer teknologi. Pembelajaran terjadi bila tenaga lokal terlibat, pemasok memenuhi standar, lembaga riset memecahkan masalah, dan insentif pemerintah dikaitkan dengan hasil yang dapat diaudit.

Risiko strategis harus dikelola secara terbuka. Kebijakan harga yang tidak konsisten menurunkan insentif produksi atau membebani konsumen. Proyek lahan besar tanpa pengetahuan agroekologi dan hak masyarakat dapat menciptakan kerusakan serta konflik. Dalam lingkungan global yang berubah cepat, kebijakan harus mempunyai batas waktu, uji manfaat-biaya, stress test, dan klausul penyesuaian. Kepastian tidak berarti aturan tidak pernah berubah; kepastian berarti perubahan mempunyai dasar, proses, jadwal, dan masa transisi yang jelas.

Kinerja perlu diukur melalui hasil per hektare, kehilangan pangan, pendapatan petani, diversifikasi gizi, volatilitas harga, dan regenerasi petani. Ukuran itu harus dibandingkan dengan pesaing relevan, dipilah menurut wilayah dan ukuran perusahaan, serta dilengkapi pengalaman

pengguna layanan. Peringkat internasional dapat menjadi sinyal, tetapi keputusan tidak boleh diarahkan hanya untuk mempercantik posisi. Tujuan akhirnya ialah produktivitas, nilai tambah, pekerjaan bermutu, ketahanan, dan kesejahteraan.

Dari sudut manajemen strategis, agenda ini memerlukan keselarasan antara tujuan nasional dan keputusan organisasi. Pemerintah menetapkan arah serta barang publik; perusahaan melakukan inovasi dan investasi; lembaga pendidikan membangun kompetensi; pemerintah daerah mengembangkan klaster; dan masyarakat menjaga akuntabilitas. Keunggulan kompetitif Indonesia akan muncul dari kualitas hubungan di antara aktor tersebut, bukan dari satu proyek unggulan.

11. Energi, Dekarbonisasi, dan Daya Saing Hijau

Transisi energi bukan biaya tambahan bagi visi 2045, melainkan prasyarat akses pasar, kesehatan publik, ketahanan, dan industri masa depan. Permintaan energi akan meningkat seiring urbanisasi dan industrialisasi, sementara batu bara masih dominan. Di sisi lain, Indonesia memiliki sumber surya, panas bumi, hidro, bioenergi, dan potensi penyimpanan yang besar. Dalam globalisasi baru, isu ini berkaitan langsung dengan standar karbon serta perlombaan teknologi bersih. Negara yang berhasil bukan selalu negara dengan sumber daya paling banyak, tetapi negara yang paling cepat menggabungkan pengetahuan, organisasi, infrastruktur, dan kepercayaan menjadi kemampuan produksi yang sulit ditiru.

Posisi Indonesia harus dibaca melalui peluang sekaligus kesenjangan kapabilitas. Perencanaan jaringan, percepatan energi terbarukan, reformasi subsidi, efisiensi bangunan dan industri, transportasi publik, serta penghentian bertahap pembangkit paling tidak efisien harus dirangkai dalam transisi yang adil. Harga karbon dan pembiayaan campuran dapat membantu. Kebijakan publik perlu mengurangi biaya koordinasi yang tidak dapat diselesaikan perusahaan secara individual, namun tetap menjaga tekanan persaingan. Dukungan tanpa persaingan menghasilkan rente; persaingan tanpa pembangunan kemampuan membuat pelaku domestik tertinggal.

Ilustrasinya dapat dilihat pada situasi berikut. Daerah tambang dapat memakai masa penerimaan tinggi untuk memetakan keterampilan pekerja, menarik industri baru, memulihkan lahan, dan membangun sekolah vokasi. Transisi adil dimulai sebelum permintaan batu bara menurun tajam. Kasus ini menegaskan bahwa investasi dan perdagangan tidak otomatis membawa transfer teknologi. Pembelajaran terjadi bila tenaga lokal terlibat, pemasok memenuhi standar, lembaga riset memecahkan masalah, dan insentif pemerintah dikaitkan dengan hasil yang dapat diaudit.

Risiko strategis harus dikelola secara terbuka. Transisi yang mendadak dapat memukul pekerja dan daerah penghasil fosil; transisi yang terlalu lambat menciptakan aset terlantar dan kehilangan pasar ekspor. Klaim hijau tanpa verifikasi juga merusak kredibilitas. Dalam lingkungan global yang berubah cepat, kebijakan harus mempunyai batas waktu, uji manfaat-biaya, stress test, dan klausul penyesuaian. Kepastian tidak berarti aturan tidak pernah berubah; kepastian berarti perubahan mempunyai dasar, proses, jadwal, dan masa transisi yang jelas.

Kinerja perlu diukur melalui intensitas emisi PDB, bauran energi terbarukan, keandalan listrik, efisiensi energi, pekerjaan hijau, dan kualitas udara. Ukuran itu harus dibandingkan dengan pesaing relevan, dipilah menurut wilayah dan ukuran perusahaan, serta dilengkapi pengalaman pengguna layanan. Peringkat internasional dapat menjadi sinyal, tetapi keputusan

tidak boleh diarahkan hanya untuk mempercantik posisi. Tujuan akhirnya ialah produktivitas, nilai tambah, pekerjaan bermutu, ketahanan, dan kesejahteraan.

Dari sudut manajemen strategis, agenda ini memerlukan keselarasan antara tujuan nasional dan keputusan organisasi. Pemerintah menetapkan arah serta barang publik; perusahaan melakukan inovasi dan investasi; lembaga pendidikan membangun kompetensi; pemerintah daerah mengembangkan klaster; dan masyarakat menjaga akuntabilitas. Keunggulan kompetitif Indonesia akan muncul dari kualitas hubungan di antara aktor tersebut, bukan dari satu proyek unggulan.

12. Infrastruktur, Kota, Perumahan, dan Konektivitas Nusantara

Infrastruktur menghasilkan kemajuan ketika membentuk jaringan ekonomi yang hidup, bukan ketika sekadar menambah daftar proyek fisik. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi biaya logistik dan kesenjangan akses. Urbanisasi menciptakan skala ekonomi, tetapi juga kemacetan, permukiman tidak layak, banjir, polusi, serta harga tanah yang menyingkirkan pekerja. Dalam globalisasi baru, isu ini berkaitan langsung dengan logistik kepulauan dan konektivitas global. Negara yang berhasil bukan selalu negara dengan sumber daya paling banyak, tetapi negara yang paling cepat menggabungkan pengetahuan, organisasi, infrastruktur, dan kepercayaan menjadi kemampuan produksi yang sulit ditiru.

Posisi Indonesia harus dibaca melalui peluang sekaligus kesenjangan kapabilitas. Penilaian proyek harus memasukkan keterhubungan antarmoda, pemeliharaan, ketahanan iklim, dan dampak tata ruang. Kota perlu mengarahkan kepadatan di sekitar angkutan massal, menyediakan perumahan terjangkau, ruang publik, air, sanitasi, dan pemerintahan metropolitan. Kebijakan publik perlu mengurangi biaya koordinasi yang tidak dapat diselesaikan perusahaan secara individual, namun tetap menjaga tekanan persaingan. Dukungan tanpa persaingan menghasilkan rente; persaingan tanpa pembangunan kemampuan membuat pelaku domestik tertinggal.

Ilustrasinya dapat dilihat pada situasi berikut. Satu jalur kereta komuter memberi manfaat maksimal bila tarif terjangkau, jadwal terintegrasi, pejalan kaki aman, dan perumahan dekat stasiun tersedia. Infrastruktur adalah sistem pelayanan, bukan hanya aset. Kasus ini menegaskan bahwa investasi dan perdagangan tidak otomatis membawa transfer teknologi. Pembelajaran terjadi bila tenaga lokal terlibat, pemasok memenuhi standar, lembaga riset memecahkan masalah, dan insentif pemerintah dikaitkan dengan hasil yang dapat diaudit.

Risiko strategis harus dikelola secara terbuka. Jalan tanpa tata ruang dapat memperluas kota secara boros; pelabuhan tanpa muatan balik menjadi mahal; perumahan jauh dari pekerjaan menambah biaya hidup. Pembiayaan di luar anggaran juga dapat menyembunyikan risiko fiskal. Dalam lingkungan global yang berubah cepat, kebijakan harus mempunyai batas waktu, uji manfaat-biaya, stress test, dan klausul penyesuaian. Kepastian tidak berarti aturan tidak pernah berubah; kepastian berarti perubahan mempunyai dasar, proses, jadwal, dan masa transisi yang jelas.

Kinerja perlu diukur melalui biaya logistik, waktu perjalanan, akses air dan sanitasi, backlog perumahan, pemanfaatan angkutan umum, dan kualitas pemeliharaan. Ukuran itu harus dibandingkan dengan pesaing relevan, dipilih menurut wilayah dan ukuran perusahaan, serta

dilengkapi pengalaman pengguna layanan. Peringkat internasional dapat menjadi sinyal, tetapi keputusan tidak boleh diarahkan hanya untuk mempercantik posisi. Tujuan akhirnya ialah produktivitas, nilai tambah, pekerjaan bermutu, ketahanan, dan kesejahteraan.

Dari sudut manajemen strategis, agenda ini memerlukan keselarasan antara tujuan nasional dan keputusan organisasi. Pemerintah menetapkan arah serta barang publik; perusahaan melakukan inovasi dan investasi; lembaga pendidikan membangun kompetensi; pemerintah daerah mengembangkan klaster; dan masyarakat menjaga akuntabilitas. Keunggulan kompetitif Indonesia akan muncul dari kualitas hubungan di antara aktor tersebut, bukan dari satu proyek unggulan.

13. Ekonomi Maritim dan Integrasi Wilayah Kepulauan

Laut harus diperlakukan sebagai ruang produksi, konektivitas, pangan, energi, dan ekologi yang terintegrasi. Perikanan, pelayaran, pelabuhan, wisata bahari, bioteknologi laut, dan energi lepas pantai menawarkan nilai besar. Namun, penangkapan ilegal, kerusakan habitat, data stok lemah, serta logistik dingin yang tidak merata membatasi manfaat. Dalam globalisasi baru, isu ini berkaitan langsung dengan geopolitik maritim dan ekonomi biru. Negara yang berhasil bukan selalu negara dengan sumber daya paling banyak, tetapi negara yang paling cepat menggabungkan pengetahuan, organisasi, infrastruktur, dan kepercayaan menjadi kemampuan produksi yang sulit ditiru.

Posisi Indonesia harus dibaca melalui peluang sekaligus kesenjangan kapabilitas. Pengelolaan berbasis wilayah tangkap, pelacakan kapal, pelabuhan perikanan efisien, budidaya berkelanjutan, riset kelautan, industri galangan, dan perlindungan pesisir perlu dipadukan. Masyarakat adat dan nelayan kecil harus menjadi pelaku, bukan penonton. Kebijakan publik perlu mengurangi biaya koordinasi yang tidak dapat diselesaikan perusahaan secara individual, namun tetap menjaga tekanan persaingan. Dukungan tanpa persaingan menghasilkan rente; persaingan tanpa pembangunan kemampuan membuat pelaku domestik tertinggal.

Ilustrasinya dapat dilihat pada situasi berikut. Kabupaten kepulauan dapat menggabungkan zona konservasi, budidaya, energi surya, penyimpanan dingin, dan jadwal kapal reguler. Nilai tambah tumbuh bersama kesehatan ekosistem bila aturan dipercaya dan diawasi. Kasus ini menegaskan bahwa investasi dan perdagangan tidak otomatis membawa transfer teknologi. Pembelajaran terjadi bila tenaga lokal terlibat, pemasok memenuhi standar, lembaga riset memecahkan masalah, dan insentif pemerintah dikaitkan dengan hasil yang dapat diaudit.

Risiko strategis harus dikelola secara terbuka. Eksploitasi tanpa sains menguras stok ikan dan menurunkan pendapatan. Proyek pesisir yang mengabaikan mangrove, terumbu, dan hak lokal meningkatkan risiko bencana dan konflik. Dalam lingkungan global yang berubah cepat, kebijakan harus mempunyai batas waktu, uji manfaat-biaya, stress test, dan klausul penyesuaian. Kepastian tidak berarti aturan tidak pernah berubah; kepastian berarti perubahan mempunyai dasar, proses, jadwal, dan masa transisi yang jelas.

Kinerja perlu diukur melalui stok ikan, pendapatan nelayan, nilai tambah pengolahan, konektivitas antarpulau, luas ekosistem sehat, dan emisi pelayaran. Ukuran itu harus dibandingkan dengan pesaing relevan, dipilih menurut wilayah dan ukuran perusahaan, serta dilengkapi pengalaman pengguna layanan. Peringkat internasional dapat menjadi sinyal, tetapi keputusan tidak boleh diarahkan hanya untuk mempercantik posisi. Tujuan akhirnya ialah produktivitas, nilai tambah, pekerjaan bermutu, ketahanan, dan kesejahteraan.

Dari sudut manajemen strategis, agenda ini memerlukan keselarasan antara tujuan nasional dan keputusan organisasi. Pemerintah menetapkan arah serta barang publik; perusahaan melakukan inovasi dan investasi; lembaga pendidikan membangun kompetensi; pemerintah daerah mengembangkan klaster; dan masyarakat menjaga akuntabilitas. Keunggulan kompetitif Indonesia akan muncul dari kualitas hubungan di antara aktor tersebut, bukan dari satu proyek unggulan.

14. Pembiayaan Pembangunan, Pajak, dan Kedalaman Keuangan

Ambisi 2045 memerlukan negara yang mampu menghimpun pendapatan secara adil dan sistem keuangan yang menyalurkan tabungan ke investasi produktif. Kebutuhan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan sosial, dan transisi energi sangat besar, sementara ruang fiskal terbatas. Perbankan masih dominan dan pembiayaan jangka panjang bagi inovasi serta infrastruktur belum dalam. Dalam globalisasi baru, isu ini berkaitan langsung dengan arus modal global dan pembiayaan hijau. Negara yang berhasil bukan selalu negara dengan sumber daya paling banyak, tetapi negara yang paling cepat menggabungkan pengetahuan, organisasi, infrastruktur, dan kepercayaan menjadi kemampuan produksi yang sulit ditiru.

Posisi Indonesia harus dibaca melalui peluang sekaligus kesenjangan kapabilitas. Perluasan basis pajak, administrasi digital, kepatuhan kelompok berpendapatan tinggi, evaluasi insentif, dan pengurangan kebocoran harus mendahului kenaikan beban umum. Dana pensiun, pasar obligasi, pembiayaan hijau, dan modal ventura perlu diperkuat dengan tata kelola. Kebijakan publik perlu mengurangi biaya koordinasi yang tidak dapat diselesaikan perusahaan secara individual, namun tetap menjaga tekanan persaingan. Dukungan tanpa persaingan menghasilkan rente; persaingan tanpa pembangunan kemampuan membuat pelaku domestik tertinggal.

Ilustrasinya dapat dilihat pada situasi berikut. Kontrak kemitraan publik-swasta yang baik membagi risiko kepada pihak yang paling mampu mengelolanya, mempublikasikan kewajiban kontinjensi, dan membayar berdasarkan mutu layanan. Ia bukan cara menyembunyikan utang. Kasus ini menegaskan bahwa investasi dan perdagangan tidak otomatis membawa transfer teknologi. Pembelajaran terjadi bila tenaga lokal terlibat, pemasok memenuhi standar, lembaga riset memecahkan masalah, dan insentif pemerintah dikaitkan dengan hasil yang dapat diaudit.

Risiko strategis harus dikelola secara terbuka. Utang untuk proyek berimbal hasil rendah memindahkan beban kepada generasi berikut. Penjaminan implisit kepada BUMN atau kendaraan investasi dapat mengaburkan risiko. Pengejaran penerimaan tanpa legitimasi melemahkan kepatuhan. Dalam lingkungan global yang berubah cepat, kebijakan harus mempunyai batas waktu, uji manfaat-biaya, stress test, dan klausul penyesuaian. Kepastian tidak berarti aturan tidak pernah berubah; kepastian berarti perubahan mempunyai dasar, proses, jadwal, dan masa transisi yang jelas.

Kinerja perlu diukur melalui rasio pajak, kualitas belanja, investasi swasta, kedalaman pasar modal, biaya modal UMKM, dan transparansi kewajiban fiskal. Ukuran itu harus dibandingkan dengan pesaing relevan, dipilah menurut wilayah dan ukuran perusahaan, serta dilengkapi pengalaman pengguna layanan. Peringkat internasional dapat menjadi sinyal, tetapi

keputusan tidak boleh diarahkan hanya untuk mempercantik posisi. Tujuan akhirnya ialah produktivitas, nilai tambah, pekerjaan bermutu, ketahanan, dan kesejahteraan.

Dari sudut manajemen strategis, agenda ini memerlukan keselarasan antara tujuan nasional dan keputusan organisasi. Pemerintah menetapkan arah serta barang publik; perusahaan melakukan inovasi dan investasi; lembaga pendidikan membangun kompetensi; pemerintah daerah mengembangkan klaster; dan masyarakat menjaga akuntabilitas. Keunggulan kompetitif Indonesia akan muncul dari kualitas hubungan di antara aktor tersebut, bukan dari satu proyek unggulan.

15. UMKM, Kewirausahaan, Persaingan, dan Naik Kelas

UMKM tidak cukup dipuji sebagai tulang punggung; kebijakan harus memungkinkan sebagian usaha tumbuh menjadi perusahaan produktif dan eksportir. Usaha mikro menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi bantalan krisis, tetapi ukuran kecil sering berkaitan dengan rendahnya teknologi, manajemen, standar, dan akses pembiayaan. Ekonomi yang sehat membutuhkan dinamika masuk, tumbuh, dan keluar. Dalam globalisasi baru, isu ini berkaitan langsung dengan persaingan perusahaan dan integrasi UMKM. Negara yang berhasil bukan selalu negara dengan sumber daya paling banyak, tetapi negara yang paling cepat menggabungkan pengetahuan, organisasi, infrastruktur, dan kepercayaan menjadi kemampuan produksi yang sulit ditiru.

Posisi Indonesia harus dibaca melalui peluang sekaligus kesenjangan kapabilitas. Perizinan sederhana, identitas usaha tunggal, pembukuan digital, layanan pengembangan bisnis, pengadaan terbuka, standardisasi, serta pembiayaan berbasis arus kas dapat membantu. Hukum persaingan harus mencegah dominasi yang menutup akses pasar. Kebijakan publik perlu mengurangi biaya koordinasi yang tidak dapat diselesaikan perusahaan secara individual, namun tetap menjaga tekanan persaingan. Dukungan tanpa persaingan menghasilkan rente; persaingan tanpa pembangunan kemampuan membuat pelaku domestik tertinggal.

Ilustrasinya dapat dilihat pada situasi berikut. Produsen pangan lokal dapat naik kelas melalui laboratorium keamanan pangan bersama, desain kemasan, agregator ekspor, dan kontrak ritel. Bantuan paling efektif menurunkan biaya kemampuan yang sulit ditanggung sendiri. Kasus ini menegaskan bahwa investasi dan perdagangan tidak otomatis membawa transfer teknologi. Pembelajaran terjadi bila tenaga lokal terlibat, pemasok memenuhi standar, lembaga riset memecahkan masalah, dan insentif pemerintah dikaitkan dengan hasil yang dapat diaudit.

Risiko strategis harus dikelola secara terbuka. Kredit murah tanpa seleksi dan pendampingan dapat menjadi subsidi permanen. Kebijakan yang menahan perusahaan tetap kecil demi fasilitas justru menciptakan perangkap skala. Dalam lingkungan global yang berubah cepat, kebijakan harus mempunyai batas waktu, uji manfaat-biaya, stress test, dan klausul penyesuaian. Kepastian tidak berarti aturan tidak pernah berubah; kepastian berarti perubahan mempunyai dasar, proses, jadwal, dan masa transisi yang jelas.

Kinerja perlu diukur melalui pertumbuhan produktivitas dan omzet, jumlah usaha formal, survival perusahaan muda, ekspor UMKM, akses kredit, dan tingkat konsentrasi pasar. Ukuran itu harus dibandingkan dengan pesaing relevan, dipilah menurut wilayah dan ukuran perusahaan, serta dilengkapi pengalaman pengguna layanan. Peringkat internasional dapat menjadi sinyal, tetapi keputusan tidak boleh diarahkan hanya untuk mempercantik posisi.

Tujuan akhirnya ialah produktivitas, nilai tambah, pekerjaan bermutu, ketahanan, dan kesejahteraan.

Dari sudut manajemen strategis, agenda ini memerlukan keselarasan antara tujuan nasional dan keputusan organisasi. Pemerintah menetapkan arah serta barang publik; perusahaan melakukan inovasi dan investasi; lembaga pendidikan membangun kompetensi; pemerintah daerah mengembangkan klaster; dan masyarakat menjaga akuntabilitas. Keunggulan kompetitif Indonesia akan muncul dari kualitas hubungan di antara aktor tersebut, bukan dari satu proyek unggulan.

16. Ketimpangan, Kemiskinan, dan Kontrak Sosial

Pertumbuhan yang tidak memperluas kesempatan akan kehilangan legitimasi politik dan melemahkan basis permintaan jangka panjang. BPS mencatat rasio Gini pengeluaran 0,375 pada Maret 2025, lebih rendah daripada September 2024, tetapi kesenjangan kota-desa dan antardaerah tetap nyata. Pengukuran pengeluaran juga tidak sepenuhnya menangkap konsentrasi kekayaan dan akses terhadap layanan. Dalam globalisasi baru, isu ini berkaitan langsung dengan legitimasi sosial dari keterbukaan. Negara yang berhasil bukan selalu negara dengan sumber daya paling banyak, tetapi negara yang paling cepat menggabungkan pengetahuan, organisasi, infrastruktur, dan kepercayaan menjadi kemampuan produksi yang sulit ditiru.

Posisi Indonesia harus dibaca melalui peluang sekaligus kesenjangan kapabilitas. Perlindungan sosial adaptif, pajak progresif yang efektif, layanan dasar universal, kebijakan pasar kerja, kepemilikan aset produktif, dan pembangunan daerah harus dirangkai. Data sosial terpadu perlu dinamis dan menyediakan mekanisme koreksi. Kebijakan publik perlu mengurangi biaya koordinasi yang tidak dapat diselesaikan perusahaan secara individual, namun tetap menjaga tekanan persaingan. Dukungan tanpa persaingan menghasilkan rente; persaingan tanpa pembangunan kemampuan membuat pelaku domestik tertinggal.

Ilustrasinya dapat dilihat pada situasi berikut. Keluarga rentan yang kehilangan pekerjaan akibat bencana memerlukan bantuan tunai cepat, layanan kesehatan, dukungan sekolah, dan akses penempatan kerja. Satu kartu tidak cukup bila institusi di belakangnya tidak terhubung. Kasus ini menegaskan bahwa investasi dan perdagangan tidak otomatis membawa transfer teknologi. Pembelajaran terjadi bila tenaga lokal terlibat, pemasok memenuhi standar, lembaga riset memecahkan masalah, dan insentif pemerintah dikaitkan dengan hasil yang dapat diaudit.

Risiko strategis harus dikelola secara terbuka. Bantuan yang terfragmentasi menciptakan duplikasi dan exclusion error. Populisme harga dapat menghabiskan anggaran tetapi lebih banyak dinikmati kelompok mampu. Ketimpangan ekstrem juga memengaruhi kebijakan melalui konsentrasi kekuasaan. Dalam lingkungan global yang berubah cepat, kebijakan harus mempunyai batas waktu, uji manfaat-biaya, stress test, dan klausul penyesuaian. Kepastian tidak berarti aturan tidak pernah berubah; kepastian berarti perubahan mempunyai dasar, proses, jadwal, dan masa transisi yang jelas.

Kinerja perlu diukur melalui kemiskinan multidimensi, rasio Gini pendapatan dan kekayaan, mobilitas antargenerasi, akses layanan dasar, serta ketepatan perlindungan sosial. Ukuran itu harus dibandingkan dengan pesaing relevan, dipilih menurut wilayah dan ukuran perusahaan, serta dilengkapi pengalaman pengguna layanan. Peringkat internasional dapat menjadi sinyal,

tetapi keputusan tidak boleh diarahkan hanya untuk mempercantik posisi. Tujuan akhirnya ialah produktivitas, nilai tambah, pekerjaan bermutu, ketahanan, dan kesejahteraan.

Dari sudut manajemen strategis, agenda ini memerlukan keselarasan antara tujuan nasional dan keputusan organisasi. Pemerintah menetapkan arah serta barang publik; perusahaan melakukan inovasi dan investasi; lembaga pendidikan membangun kompetensi; pemerintah daerah mengembangkan klaster; dan masyarakat menjaga akuntabilitas. Keunggulan kompetitif Indonesia akan muncul dari kualitas hubungan di antara aktor tersebut, bukan dari satu proyek unggulan.

17. Ketimpangan Wilayah, Desentralisasi, dan Kapasitas

Daerah

Indonesia maju harus bertumpu pada banyak pusat pertumbuhan, bukan satu pulau yang semakin padat dan wilayah lain yang hanya memasok komoditas. Pada 2025 Jawa masih menyumbang sekitar 56,93 persen PDB nasional. Desentralisasi membuka ruang inovasi lokal, tetapi kapasitas perencanaan, basis pendapatan, dan mutu belanja sangat beragam. Penelitian Mursalin dan Irawan (2025) menegaskan persistensi ketimpangan spasial. Dalam globalisasi baru, isu ini berkaitan langsung dengan klaster daerah dan koneksi ekspor. Negara yang berhasil bukan selalu negara dengan sumber daya paling banyak, tetapi negara yang paling cepat menggabungkan pengetahuan, organisasi, infrastruktur, dan kepercayaan menjadi kemampuan produksi yang sulit ditiru.

Posisi Indonesia harus dibaca melalui peluang sekaligus kesenjangan kapabilitas. Transfer antarpemerintah perlu memberi insentif kinerja tanpa menghukum daerah tertinggal. Layanan bersama antardaerah, penguatan kota menengah, universitas regional, konektivitas, dan spesialisasi ekonomi berbasis potensi lokal dapat membangun jaringan pertumbuhan. Kebijakan publik perlu mengurangi biaya koordinasi yang tidak dapat diselesaikan perusahaan secara individual, namun tetap menjaga tekanan persaingan. Dukungan tanpa persaingan menghasilkan rente; persaingan tanpa pembangunan kemampuan membuat pelaku domestik tertinggal.

Ilustrasinya dapat dilihat pada situasi berikut. Sebuah koridor timur Indonesia dapat menghubungkan pelabuhan, produksi pangan, pariwisata, energi bersih, dan pendidikan vokasi lintas kabupaten. Koordinasi fungsional sering lebih penting daripada batas administratif. Kasus ini menegaskan bahwa investasi dan perdagangan tidak otomatis membawa transfer teknologi. Pembelajaran terjadi bila tenaga lokal terlibat, pemasok memenuhi standar, lembaga riset memecahkan masalah, dan insentif pemerintah dikaitkan dengan hasil yang dapat diaudit.

Risiko strategis harus dikelola secara terbuka. Pemekaran dan proyek simbolik dapat menambah biaya administrasi. Sentralisasi berlebihan melemahkan pembelajaran lokal; desentralisasi tanpa akuntabilitas memindahkan rente ke daerah. Dalam lingkungan global yang berubah cepat, kebijakan harus mempunyai batas waktu, uji manfaat-biaya, stress test, dan klausul penyesuaian. Kepastian tidak berarti aturan tidak pernah berubah; kepastian berarti perubahan mempunyai dasar, proses, jadwal, dan masa transisi yang jelas.

Kinerja perlu diukur melalui disparitas PDRB per kapita, indeks pelayanan minimum, pendapatan asli daerah yang sehat, kualitas belanja, migrasi terpaksa, dan konektivitas. Ukuran itu harus dibandingkan dengan pesaing relevan, dipilih menurut wilayah dan ukuran

perusahaan, serta dilengkapi pengalaman pengguna layanan. Peringkat internasional dapat menjadi sinyal, tetapi keputusan tidak boleh diarahkan hanya untuk mempercantik posisi. Tujuan akhirnya ialah produktivitas, nilai tambah, pekerjaan bermutu, ketahanan, dan kesejahteraan.

Dari sudut manajemen strategis, agenda ini memerlukan keselarasan antara tujuan nasional dan keputusan organisasi. Pemerintah menetapkan arah serta barang publik; perusahaan melakukan inovasi dan investasi; lembaga pendidikan membangun kompetensi; pemerintah daerah mengembangkan klaster; dan masyarakat menjaga akuntabilitas. Keunggulan kompetitif Indonesia akan muncul dari kualitas hubungan di antara aktor tersebut, bukan dari satu proyek unggulan.

18. Institusi, Kepastian Hukum, dan Kapasitas Negara

Kualitas institusi menentukan apakah sumber daya dan investasi berubah menjadi kemakmuran atau menjadi rente. Investor dan warga membutuhkan aturan yang dapat diprediksi, proses yang cepat, pengadilan terpercaya, serta administrasi yang tidak berubah karena transaksi informal. Fragmentasi kewenangan meningkatkan biaya koordinasi dan membuka ruang diskresi. Dalam globalisasi baru, isu ini berkaitan langsung dengan kepastian hukum bagi investasi. Negara yang berhasil bukan selalu negara dengan sumber daya paling banyak, tetapi negara yang paling cepat menggabungkan pengetahuan, organisasi, infrastruktur, dan kepercayaan menjadi kemampuan produksi yang sulit ditiru.

Posisi Indonesia harus dibaca melalui peluang sekaligus kesenjangan kapabilitas. Reformasi regulasi harus disertai reformasi birokrasi, meritokrasi, interoperabilitas data, pengadaan transparan, pengawasan independen, dan akses keadilan. Evaluasi kebijakan perlu dilembagakan sehingga program dapat dihentikan atau diperbaiki berdasarkan bukti. Kebijakan publik perlu mengurangi biaya koordinasi yang tidak dapat diselesaikan perusahaan secara individual, namun tetap menjaga tekanan persaingan. Dukungan tanpa persaingan menghasilkan rente; persaingan tanpa pembangunan kemampuan membuat pelaku domestik tertinggal.

Ilustrasinya dapat dilihat pada situasi berikut. Perizinan terpadu yang efektif bukan hanya portal tunggal. Ia membutuhkan peta kewenangan, batas waktu, standar layanan, jejak audit, mekanisme keberatan, dan pejabat yang bertanggung jawab atas hasil. Kasus ini menegaskan bahwa investasi dan perdagangan tidak otomatis membawa transfer teknologi. Pembelajaran terjadi bila tenaga lokal terlibat, pemasok memenuhi standar, lembaga riset memecahkan masalah, dan insentif pemerintah dikaitkan dengan hasil yang dapat diaudit.

Risiko strategis harus dikelola secara terbuka. Digitalisasi proses yang buruk hanya memindahkan birokrasi ke layar. Penyederhanaan tanpa checks and balances dapat mempercepat keputusan sekaligus memperbesar penyalahgunaan. Stabilitas semu yang menekan kritik menghilangkan informasi penting. Dalam lingkungan global yang berubah cepat, kebijakan harus mempunyai batas waktu, uji manfaat-biaya, stress test, dan klausul penyesuaian. Kepastian tidak berarti aturan tidak pernah berubah; kepastian berarti perubahan mempunyai dasar, proses, jadwal, dan masa transisi yang jelas.

Kinerja perlu diukur melalui kepastian kontrak, waktu penyelesaian perkara, kualitas regulasi, kompetisi pengadaan, efektivitas layanan, dan tindak lanjut evaluasi. Ukuran itu harus dibandingkan dengan pesaing relevan, dipilih menurut wilayah dan ukuran perusahaan, serta

dilengkapi pengalaman pengguna layanan. Peringkat internasional dapat menjadi sinyal, tetapi keputusan tidak boleh diarahkan hanya untuk mempercantik posisi. Tujuan akhirnya ialah produktivitas, nilai tambah, pekerjaan bermutu, ketahanan, dan kesejahteraan.

Dari sudut manajemen strategis, agenda ini memerlukan keselarasan antara tujuan nasional dan keputusan organisasi. Pemerintah menetapkan arah serta barang publik; perusahaan melakukan inovasi dan investasi; lembaga pendidikan membangun kompetensi; pemerintah daerah mengembangkan klaster; dan masyarakat menjaga akuntabilitas. Keunggulan kompetitif Indonesia akan muncul dari kualitas hubungan di antara aktor tersebut, bukan dari satu proyek unggulan.

19. Demokrasi Ekonomi, Partisipasi, dan Kepercayaan Publik

Transformasi dua dekade memerlukan kepercayaan yang tidak dapat dibangun hanya melalui komunikasi; kepercayaan lahir dari prosedur adil dan hasil yang dapat dirasakan. Kebijakan industri, transisi energi, pembangunan kota, dan reformasi pajak menciptakan pemenang serta pihak yang menanggung biaya. Tanpa mekanisme partisipasi, pengetahuan lokal hilang dan resistensi meningkat. Dalam globalisasi baru, isu ini berkaitan langsung dengan kepercayaan publik dalam reformasi. Negara yang berhasil bukan selalu negara dengan sumber daya paling banyak, tetapi negara yang paling cepat menggabungkan pengetahuan, organisasi, infrastruktur, dan kepercayaan menjadi kemampuan produksi yang sulit ditiru.

Posisi Indonesia harus dibaca melalui peluang sekaligus kesenjangan kapabilitas. Pemerintah perlu membuka data, menjelaskan pilihan, melakukan konsultasi bermakna, melindungi kebebasan akademik, dan menyediakan mekanisme pengaduan. Dialog sosial antara pekerja, pengusaha, komunitas, dan negara membantu membagi risiko perubahan. Kebijakan publik perlu mengurangi biaya koordinasi yang tidak dapat diselesaikan perusahaan secara individual, namun tetap menjaga tekanan persaingan. Dukungan tanpa persaingan menghasilkan rente; persaingan tanpa pembangunan kemampuan membuat pelaku domestik tertinggal.

Ilustrasinya dapat dilihat pada situasi berikut. Penutupan pembangkit batu bara seharusnya dibahas bersama pekerja, pemerintah daerah, perusahaan, dan warga. Jadwal, pelatihan, pemulihan lahan, sumber pendapatan baru, serta kompensasi perlu disepakati sebelum keputusan berlaku. Kasus ini menegaskan bahwa investasi dan perdagangan tidak otomatis membawa transfer teknologi. Pembelajaran terjadi bila tenaga lokal terlibat, pemasok memenuhi standar, lembaga riset memecahkan masalah, dan insentif pemerintah dikaitkan dengan hasil yang dapat diaudit.

Risiko strategis harus dikelola secara terbuka. Partisipasi seremonial memperburuk sinisme. Disinformasi digital juga dapat membajak perdebatan, tetapi respons yang terlalu represif merusak ruang koreksi dan inovasi. Dalam lingkungan global yang berubah cepat, kebijakan harus mempunyai batas waktu, uji manfaat-biaya, stress test, dan klausul penyesuaian. Kepastian tidak berarti aturan tidak pernah berubah; kepastian berarti perubahan mempunyai dasar, proses, jadwal, dan masa transisi yang jelas.

Kinerja perlu diukur melalui kepercayaan institusional, keterbukaan data, penyelesaian pengaduan, kualitas konsultasi, kebebasan riset, dan konflik kebijakan. Ukuran itu harus

dibandingkan dengan pesaing relevan, dipilih menurut wilayah dan ukuran perusahaan, serta dilengkapi pengalaman pengguna layanan. Peringkat internasional dapat menjadi sinyal, tetapi keputusan tidak boleh diarahkan hanya untuk mempercantik posisi. Tujuan akhirnya ialah produktivitas, nilai tambah, pekerjaan bermutu, ketahanan, dan kesejahteraan.

Dari sudut manajemen strategis, agenda ini memerlukan keselarasan antara tujuan nasional dan keputusan organisasi. Pemerintah menetapkan arah serta barang publik; perusahaan melakukan inovasi dan investasi; lembaga pendidikan membangun kompetensi; pemerintah daerah mengembangkan klaster; dan masyarakat menjaga akuntabilitas. Keunggulan kompetitif Indonesia akan muncul dari kualitas hubungan di antara aktor tersebut, bukan dari satu proyek unggulan.

20. Posisi Indonesia dalam Geopolitik dan Ekonomi Dunia

Kemandirian strategis tidak berarti isolasi, melainkan kemampuan memilih kemitraan sambil memperkuat kapasitas domestik. Persaingan Amerika Serikat–Tiongkok, proteksionisme, perang teknologi, konflik energi, dan fragmentasi rantai pasok menciptakan peluang relokasi sekaligus tekanan untuk berpihak. ASEAN tetap penting sebagai pasar dan platform diplomasi. Dalam globalisasi baru, isu ini berkaitan langsung dengan kemandirian strategis yang terbuka. Negara yang berhasil bukan selalu negara dengan sumber daya paling banyak, tetapi negara yang paling cepat menggabungkan pengetahuan, organisasi, infrastruktur, dan kepercayaan menjadi kemampuan produksi yang sulit ditiru.

Posisi Indonesia harus dibaca melalui peluang sekaligus kesenjangan kapabilitas. Diplomasi ekonomi harus mengintegrasikan perdagangan, investasi, teknologi, keamanan maritim, dan standar hijau. Perjanjian internasional perlu dipakai untuk membuka pasar sekaligus mendorong reformasi domestik. Diversifikasi mitra mengurangi ketergantungan. Kebijakan publik perlu mengurangi biaya koordinasi yang tidak dapat diselesaikan perusahaan secara individual, namun tetap menjaga tekanan persaingan. Dukungan tanpa persaingan menghasilkan rente; persaingan tanpa pembangunan kemampuan membuat pelaku domestik tertinggal.

Ilustrasinya dapat dilihat pada situasi berikut. Investasi pusat produksi semikonduktor bernilai strategis bila disertai pendidikan insinyur, pemasok material, energi andal, perlindungan kekayaan intelektual, dan akses pasar. Tanpa ekosistem, fasilitas mudah berpindah ketika insentif berakhir. Kasus ini menegaskan bahwa investasi dan perdagangan tidak otomatis membawa transfer teknologi. Pembelajaran terjadi bila tenaga lokal terlibat, pemasok memenuhi standar, lembaga riset memecahkan masalah, dan insentif pemerintah dikaitkan dengan hasil yang dapat diaudit.

Risiko strategis harus dikelola secara terbuka. Nasionalisme ekonomi yang defensif dapat menurunkan persaingan dan akses teknologi; keterbukaan tanpa strategi dapat menjadikan Indonesia lokasi ekstraksi serta pasar konsumen. Perubahan tarif global menuntut respons berbasis data. Dalam lingkungan global yang berubah cepat, kebijakan harus mempunyai batas waktu, uji manfaat-biaya, stress test, dan klausul penyesuaian. Kepastian tidak berarti aturan tidak pernah berubah; kepastian berarti perubahan mempunyai dasar, proses, jadwal, dan masa transisi yang jelas.

Kinerja perlu diukur melalui diversifikasi ekspor dan investasi, partisipasi rantai nilai, transfer teknologi, perdagangan intra-ASEAN, serta ketahanan pasokan kritis. Ukuran itu harus

dibandingkan dengan pesaing relevan, dipilah menurut wilayah dan ukuran perusahaan, serta dilengkapi pengalaman pengguna layanan. Peringkat internasional dapat menjadi sinyal, tetapi keputusan tidak boleh diarahkan hanya untuk mempercantik posisi. Tujuan akhirnya ialah produktivitas, nilai tambah, pekerjaan bermutu, ketahanan, dan kesejahteraan.

Dari sudut manajemen strategis, agenda ini memerlukan keselarasan antara tujuan nasional dan keputusan organisasi. Pemerintah menetapkan arah serta barang publik; perusahaan melakukan inovasi dan investasi; lembaga pendidikan membangun kompetensi; pemerintah daerah mengembangkan klaster; dan masyarakat menjaga akuntabilitas. Keunggulan kompetitif Indonesia akan muncul dari kualitas hubungan di antara aktor tersebut, bukan dari satu proyek unggulan.

21. Risiko Iklim, Bencana, dan Ketahanan Ekonomi

Pembangunan yang mengabaikan risiko iklim akan kehilangan hasilnya melalui bencana, gangguan pangan, kerusakan infrastruktur, dan beban kesehatan. Indonesia terpapar banjir, kekeringan, kebakaran, kenaikan muka laut, dan cuaca ekstrem. Kelompok miskin menanggung dampak lebih besar karena tinggal di lokasi rentan dan memiliki tabungan serta asuransi terbatas. Dalam globalisasi baru, isu ini berkaitan langsung dengan risiko iklim terhadap perdagangan. Negara yang berhasil bukan selalu negara dengan sumber daya paling banyak, tetapi negara yang paling cepat menggabungkan pengetahuan, organisasi, infrastruktur, dan kepercayaan menjadi kemampuan produksi yang sulit ditiru.

Posisi Indonesia harus dibaca melalui peluang sekaligus kesenjangan kapabilitas. Setiap investasi publik harus melalui penilaian risiko iklim. Sistem peringatan dini, tata ruang, perlindungan pesisir berbasis alam, asuransi bencana, standar bangunan, dan anggaran kontinjensi perlu diperkuat. Adaptasi harus masuk ke pertanian dan kesehatan. Kebijakan publik perlu mengurangi biaya koordinasi yang tidak dapat diselesaikan perusahaan secara individual, namun tetap menjaga tekanan persaingan. Dukungan tanpa persaingan menghasilkan rente; persaingan tanpa pembangunan kemampuan membuat pelaku domestik tertinggal.

Ilustrasinya dapat dilihat pada situasi berikut. Kota pesisir dapat menggabungkan rehabilitasi mangrove, pengendalian pengambilan air tanah, drainase, rumah adaptif, dan jalur evakuasi. Solusi teknik dan sosial harus berjalan bersama. Kasus ini menegaskan bahwa investasi dan perdagangan tidak otomatis membawa transfer teknologi. Pembelajaran terjadi bila tenaga lokal terlibat, pemasok memenuhi standar, lembaga riset memecahkan masalah, dan insentif pemerintah dikaitkan dengan hasil yang dapat diaudit.

Risiko strategis harus dikelola secara terbuka. Rekonstruksi berulang menghabiskan fiskal. Infrastruktur pelindung yang dirancang tanpa pemeliharaan memberi rasa aman palsu. Relokasi paksa tanpa mata pencaharian baru memperbesar kerentanan sosial. Dalam lingkungan global yang berubah cepat, kebijakan harus mempunyai batas waktu, uji manfaat-biaya, stress test, dan klausul penyesuaian. Kepastian tidak berarti aturan tidak pernah berubah; kepastian berarti perubahan mempunyai dasar, proses, jadwal, dan masa transisi yang jelas.

Kinerja perlu diukur melalui kerugian bencana terhadap PDB, cakupan peringatan dini, investasi adaptasi, ketahanan infrastruktur, penetrasi asuransi, dan kecepatan pemulihan. Ukuran itu harus dibandingkan dengan pesaing relevan, dipilah menurut wilayah dan ukuran perusahaan, serta dilengkapi pengalaman pengguna layanan. Peringkat internasional dapat menjadi sinyal, tetapi keputusan tidak boleh diarahkan hanya untuk mempercantik posisi.

Tujuan akhirnya ialah produktivitas, nilai tambah, pekerjaan bermutu, ketahanan, dan kesejahteraan.

Dari sudut manajemen strategis, agenda ini memerlukan keselarasan antara tujuan nasional dan keputusan organisasi. Pemerintah menetapkan arah serta barang publik; perusahaan melakukan inovasi dan investasi; lembaga pendidikan membangun kompetensi; pemerintah daerah mengembangkan klaster; dan masyarakat menjaga akuntabilitas. Keunggulan kompetitif Indonesia akan muncul dari kualitas hubungan di antara aktor tersebut, bukan dari satu proyek unggulan.

22. Arsitektur Perdagangan dan Diplomasi Ekonomi Baru

Daya saing eksternal membutuhkan integrasi antara kebijakan perdagangan, investasi, industri, teknologi, iklim, dan keamanan ekonomi. Perjanjian dagang kini mencakup data, subsidi, standar karbon, kekayaan intelektual, rantai pasok kritis, dan pengadaan. ASEAN tetap menjadi jangkar, tetapi Indonesia harus mengelola hubungan dengan banyak pusat kekuatan. Dalam globalisasi baru, isu ini berkaitan langsung dengan diplomasi perdagangan-investasi. Negara yang berhasil bukan selalu negara dengan sumber daya paling banyak, tetapi negara yang paling cepat menggabungkan pengetahuan, organisasi, infrastruktur, dan kepercayaan menjadi kemampuan produksi yang sulit ditiru.

Posisi Indonesia harus dibaca melalui peluang sekaligus kesenjangan kapabilitas. Negosiasi internasional harus didukung analisis sektoral, konsultasi bisnis-pekerja, dan strategi penyesuaian domestik. Atase perdagangan, promosi investasi, pembiayaan ekspor, standardisasi, dan intelijen pasar perlu bekerja sebagai satu sistem. Kebijakan publik perlu mengurangi biaya koordinasi yang tidak dapat diselesaikan perusahaan secara individual, namun tetap menjaga tekanan persaingan. Dukungan tanpa persaingan menghasilkan rente; persaingan tanpa pembangunan kemampuan membuat pelaku domestik tertinggal.

Ilustrasinya dapat dilihat pada situasi berikut. Kesepakatan pasar untuk produk hijau bernilai apabila produsen Indonesia memperoleh laboratorium uji, sertifikasi, pembiayaan, serta informasi pembeli sehingga preferensi tarif benar-benar berubah menjadi ekspor. Kasus ini menegaskan bahwa investasi dan perdagangan tidak otomatis membawa transfer teknologi. Pembelajaran terjadi bila tenaga lokal terlibat, pemasok memenuhi standar, lembaga riset memecahkan masalah, dan insentif pemerintah dikaitkan dengan hasil yang dapat diaudit.

Risiko strategis harus dikelola secara terbuka. Diplomasi yang hanya mengejar penandatanganan perjanjian menghasilkan akses pasar yang tidak terpakai. Kebijakan reaktif dapat memicu pembalasan dan ketidakpastian. Dalam lingkungan global yang berubah cepat, kebijakan harus mempunyai batas waktu, uji manfaat-biaya, stress test, dan klausul penyesuaian. Kepastian tidak berarti aturan tidak pernah berubah; kepastian berarti perubahan mempunyai dasar, proses, jadwal, dan masa transisi yang jelas.

Kinerja perlu diukur melalui pemanfaatan preferensi perdagangan, diversifikasi pasar, investasi berorientasi ekspor, penyelesaian hambatan nontarif, dan partisipasi Indonesia dalam penyusunan standar global. Ukuran itu harus dibandingkan dengan pesaing relevan, dipilah menurut wilayah dan ukuran perusahaan, serta dilengkapi pengalaman pengguna layanan. Peringkat internasional dapat menjadi sinyal, tetapi keputusan tidak boleh diarahkan hanya untuk mempercantik posisi. Tujuan akhirnya ialah produktivitas, nilai tambah, pekerjaan bermutu, ketahanan, dan kesejahteraan.

Dari sudut manajemen strategis, agenda ini memerlukan keselarasan antara tujuan nasional dan keputusan organisasi. Pemerintah menetapkan arah serta barang publik; perusahaan melakukan inovasi dan investasi; lembaga pendidikan membangun kompetensi; pemerintah daerah mengembangkan klaster; dan masyarakat menjaga akuntabilitas. Keunggulan kompetitif Indonesia akan muncul dari kualitas hubungan di antara aktor tersebut, bukan dari satu proyek unggulan.

23. Ketahanan Rantai Pasok dan Manajemen Risiko Global

Efisiensi harus diseimbangkan dengan ketahanan karena gangguan geopolitik, pandemi, bencana, dan serangan siber dapat menghentikan produksi. Globalisasi baru mendorong perusahaan melakukan China-plus-one, nearshoring, friend-shoring, dan diversifikasi pemasok. Indonesia dapat menarik relokasi, tetapi juga rentan pada komponen, pangan, energi, dan teknologi yang terkonsentrasi. Dalam globalisasi baru, isu ini berkaitan langsung dengan kontinuitas pasokan kritis. Negara yang berhasil bukan selalu negara dengan sumber daya paling banyak, tetapi negara yang paling cepat menggabungkan pengetahuan, organisasi, infrastruktur, dan kepercayaan menjadi kemampuan produksi yang sulit ditiru.

Posisi Indonesia harus dibaca melalui peluang sekaligus kesenjangan kapabilitas. Pemetaan input kritis, cadangan strategis yang terukur, pemasok alternatif, pelabuhan tangguh, keamanan siber, dan skenario kontinuitas bisnis perlu dikembangkan. Kebijakan cadangan harus berbasis risiko, bukan proteksi permanen. Kebijakan publik perlu mengurangi biaya koordinasi yang tidak dapat diselesaikan perusahaan secara individual, namun tetap menjaga tekanan persaingan. Dukungan tanpa persaingan menghasilkan rente; persaingan tanpa pembangunan kemampuan membuat pelaku domestik tertinggal.

Ilustrasinya dapat dilihat pada situasi berikut. Industri alat kesehatan dapat mengimpor komponen berteknologi tinggi sambil membangun kemampuan domestik pada barang yang sering dibutuhkan, perawatan, perangkat lunak, dan produksi darurat. Kasus ini menegaskan bahwa investasi dan perdagangan tidak otomatis membawa transfer teknologi. Pembelajaran terjadi bila tenaga lokal terlibat, pemasok memenuhi standar, lembaga riset memecahkan masalah, dan insentif pemerintah dikaitkan dengan hasil yang dapat diaudit.

Risiko strategis harus dikelola secara terbuka. Ketahanan yang didefinisikan sebagai membuat semua barang sendiri menjadi sangat mahal. Sebaliknya, ketergantungan tunggal pada satu pemasok atau jalur laut menimbulkan risiko sistemik. Dalam lingkungan global yang berubah cepat, kebijakan harus mempunyai batas waktu, uji manfaat-biaya, stress test, dan klausul penyesuaian. Kepastian tidak berarti aturan tidak pernah berubah; kepastian berarti perubahan mempunyai dasar, proses, jadwal, dan masa transisi yang jelas.

Kinerja perlu diukur melalui konsentrasi pemasok, waktu pemulihan, persediaan kritis, jumlah pemasok tersertifikasi, cakupan rencana kontinuitas, dan gangguan produksi. Ukuran itu harus dibandingkan dengan pesaing relevan, dipilah menurut wilayah dan ukuran perusahaan, serta dilengkapi pengalaman pengguna layanan. Peringkat internasional dapat menjadi sinyal, tetapi keputusan tidak boleh diarahkan hanya untuk mempercantik posisi. Tujuan akhirnya ialah produktivitas, nilai tambah, pekerjaan bermutu, ketahanan, dan kesejahteraan.

Dari sudut manajemen strategis, agenda ini memerlukan keselarasan antara tujuan nasional dan keputusan organisasi. Pemerintah menetapkan arah serta barang publik; perusahaan melakukan inovasi dan investasi; lembaga pendidikan membangun kompetensi;

pemerintah daerah mengembangkan klaster; dan masyarakat menjaga akuntabilitas. Keunggulan kompetitif Indonesia akan muncul dari kualitas hubungan di antara aktor tersebut, bukan dari satu proyek unggulan.

24. Peta Jalan Daya Saing 2026–2045 dan Disiplin Eksekusi

Strategi daya saing memerlukan prioritas, urutan reformasi, pemilik sasaran, anggaran, dan mekanisme koreksi yang terlihat publik. Indonesia memiliki banyak peta jalan sektoral, tetapi tumpang tindih indikator dan perubahan aturan mengurangi kepastian. Daya saing harus menjadi agenda lintas pemerintahan, bukan kampanye temporer. Dalam globalisasi baru, isu ini berkaitan langsung dengan disiplin implementasi lintas pemerintahan. Negara yang berhasil bukan selalu negara dengan sumber daya paling banyak, tetapi negara yang paling cepat menggabungkan pengetahuan, organisasi, infrastruktur, dan kepercayaan menjadi kemampuan produksi yang sulit ditiru.

Posisi Indonesia harus dibaca melalui peluang sekaligus kesenjangan kapabilitas. Lima tahun pertama memperbaiki pembelajaran, logistik, regulasi, data, dan proyek transisi yang siap. Tahap berikutnya memperdalam klaster, ekspor, inovasi, dan perusahaan global Indonesia. Dashboard publik harus menghubungkan hasil, program, serta anggaran. Kebijakan publik perlu mengurangi biaya koordinasi yang tidak dapat diselesaikan perusahaan secara individual, namun tetap menjaga tekanan persaingan. Dukungan tanpa persaingan menghasilkan rente; persaingan tanpa pembangunan kemampuan membuat pelaku domestik tertinggal.

Ilustrasinya dapat dilihat pada situasi berikut. Sasaran penurunan waktu ekspor harus mengidentifikasi pelabuhan, proses, instansi, teknologi, dan bottleneck; pemilik proses bertanggung jawab pada waktu ujung-ke-ujung, bukan hanya kinerja unitnya. Kasus ini menegaskan bahwa investasi dan perdagangan tidak otomatis membawa transfer teknologi. Pembelajaran terjadi bila tenaga lokal terlibat, pemasok memenuhi standar, lembaga riset memecahkan masalah, dan insentif pemerintah dikaitkan dengan hasil yang dapat diaudit.

Risiko strategis harus dikelola secara terbuka. Terlalu banyak prioritas berarti tidak ada prioritas. Indeks peringkat juga dapat dikejar secara kosmetik tanpa perubahan pengalaman perusahaan dan pekerja. Dalam lingkungan global yang berubah cepat, kebijakan harus mempunyai batas waktu, uji manfaat-biaya, stress test, dan klausul penyesuaian. Kepastian tidak berarti aturan tidak pernah berubah; kepastian berarti perubahan mempunyai dasar, proses, jadwal, dan masa transisi yang jelas.

Kinerja perlu diukur melalui produktivitas, ekspor kompleks, investasi berkualitas, waktu logistik, hasil belajar, inovasi, emisi per unit output, dan persepsi kepastian regulasi. Ukuran itu harus dibandingkan dengan pesaing relevan, dipilah menurut wilayah dan ukuran perusahaan, serta dilengkapi pengalaman pengguna layanan. Peringkat internasional dapat menjadi sinyal, tetapi keputusan tidak boleh diarahkan hanya untuk mempercantik posisi. Tujuan akhirnya ialah produktivitas, nilai tambah, pekerjaan bermutu, ketahanan, dan kesejahteraan.

Dari sudut manajemen strategis, agenda ini memerlukan keselarasan antara tujuan nasional dan keputusan organisasi. Pemerintah menetapkan arah serta barang publik; perusahaan melakukan inovasi dan investasi; lembaga pendidikan membangun kompetensi; pemerintah daerah mengembangkan klaster; dan masyarakat menjaga akuntabilitas.

Keunggulan kompetitif Indonesia akan muncul dari kualitas hubungan di antara aktor tersebut, bukan dari satu proyek unggulan.

Kesimpulan: Keterbukaan Strategis dan Kapabilitas Nasional

Daya saing ekonomi Indonesia di era globalisasi baru harus dibangun di atas produktivitas dan kemampuan belajar. Upah murah, konsesi sumber daya, serta insentif fiskal dapat menarik aktivitas tertentu, tetapi tidak cukup untuk mempertahankan investasi ketika teknologi, pasar, atau kebijakan negara asal berubah. Perusahaan akan bertahan apabila ekosistem Indonesia menyediakan pekerja kompeten, pemasok andal, energi bersih, logistik efisien, pembiayaan, pasar, dan hukum yang dapat diprediksi.

Indonesia tidak perlu memilih secara biner antara globalisasi dan nasionalisme ekonomi. Keterbukaan strategis memungkinkan negara memanfaatkan pasar, modal, teknologi, dan pengetahuan dunia sembari meningkatkan kandungan kemampuan domestik. Ukuran keberhasilan bukan semata-mata berapa banyak impor digantikan atau investasi diumumkan, melainkan seberapa besar produktivitas naik, ekspor terdiversifikasi, talenta berkembang, perusahaan lokal masuk rantai nilai, dan kerentanan kritis berkurang.

Globalisasi baru juga menuntut kontrak sosial baru. Penyesuaian industri, otomasi, dan transisi energi akan menciptakan biaya bagi pekerja serta daerah tertentu. Perlindungan sosial portabel, pelatihan, dialog sosial, dan investasi wilayah menjadi bagian kebijakan daya saing, bukan agenda terpisah. Reformasi yang adil memperoleh legitimasi dan dapat bertahan lebih lama daripada reformasi yang mengabaikan pihak yang kalah.

Pada akhirnya, daya saing adalah cermin kualitas institusi dan keputusan kolektif. Indonesia mempunyai skala, sumber daya, posisi, dan dinamika kewirausahaan yang kuat. Tantangannya ialah mengubah modal tersebut menjadi kapabilitas yang terus bertambah. Jika kebijakan konsisten, berbasis bukti, terbuka terhadap koreksi, dan disiplin pada hasil, Indonesia dapat menjadi salah satu pusat produksi, inovasi, dan ekonomi hijau dunia. Jika tidak, pasar besar hanya menjadi tujuan penjualan dan sumber daya hanya menjadi bahan baku bagi kemajuan negara lain.

Glosarium

Istilah	Pengertian
Bonus demografi	Keadaan ketika proporsi penduduk usia produktif relatif besar sehingga berpotensi mempercepat pertumbuhan jika tersedia pekerjaan dan keterampilan.
Dekarbonisasi	Proses mengurangi emisi karbon dari energi, industri, transportasi, bangunan, dan penggunaan lahan.
Ekonomi hijau	Sistem ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial sembari menekan risiko lingkungan.

Istilah	Pengertian
Ekonomi sirkular	Model yang mempertahankan nilai material melalui pengurangan, penggunaan kembali, perbaikan, dan daur ulang.
Hilirisasi	Pengembangan tahap pengolahan dan kegiatan bernilai tambah setelah produksi bahan mentah.
Industrialisasi	Perubahan struktur menuju produksi manufaktur dan jasa modern dengan produktivitas, skala, dan pembelajaran tinggi.
Informalitas	Kegiatan kerja atau usaha yang belum sepenuhnya tercakup regulasi, pencatatan, perpajakan, dan perlindungan sosial formal.
Jebakan pendapatan menengah	Keadaan ketika negara sulit melanjutkan kenaikan pendapatan karena keunggulan biaya melemah tetapi kemampuan inovasi belum kuat.
Kedalaman keuangan	Kemampuan sistem keuangan menyediakan instrumen, likuiditas, dan pembiayaan bagi kebutuhan ekonomi yang beragam.
Ketahanan ekonomi	Kemampuan ekonomi menyerap guncangan, beradaptasi, dan pulih tanpa kehilangan fungsi utama.
Modal manusia	Pengetahuan, keterampilan, kesehatan, dan kapasitas yang meningkatkan kemampuan produktif manusia.
Naik kelas UMKM	Perubahan usaha menuju produktivitas, formalitas, skala, teknologi, pasar, dan kualitas pekerjaan yang lebih tinggi.
Negara maju	Negara berpendapatan tinggi dengan produktivitas, institusi, layanan publik, inovasi, dan kualitas hidup yang kuat.
Produktivitas tenaga kerja	Nilai keluaran rata-rata yang dihasilkan oleh seorang pekerja atau satu jam kerja.
Produktivitas total faktor	Efisiensi penggunaan gabungan modal dan tenaga kerja yang mencerminkan teknologi, organisasi, dan institusi.
Rantai nilai global	Pembagian tahapan desain, produksi, logistik, pemasaran, dan layanan suatu produk di berbagai negara.
Rasio Gini	Indikator ketimpangan distribusi dengan nilai nol berarti merata sempurna dan nilai satu berarti timpang sempurna.
RPJPN	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang mengarahkan pembangunan selama dua puluh tahun.
Transisi adil	Peralihan menuju ekonomi hijau yang melindungi pekerja, komunitas, dan daerah yang menanggung biaya perubahan.

Istilah	Pengertian
Transformasi struktural	Perpindahan tenaga kerja dan sumber daya ke kegiatan yang lebih produktif disertai peningkatan produktivitas di dalam sektor.
Daya saing sistemik	Kemampuan ekonomi yang muncul dari interaksi perusahaan, klaster, kebijakan makro, institusi, dan budaya pembelajaran.
Friend-shoring	Pemindahan rantai pasok ke negara yang dianggap memiliki hubungan politik dan keamanan yang sejalan.
Globalisasi baru	Fase integrasi dunia yang lebih digital, lebih hijau, tetapi juga lebih dipengaruhi fragmentasi geopolitik dan keamanan ekonomi.
Keterbukaan strategis	Keterlibatan aktif dalam ekonomi global yang secara sadar dipakai untuk memperbesar kemampuan dan ketahanan domestik.
Nearshoring	Pemindahan produksi atau pemasok ke negara yang lebih dekat dengan pasar utama.
Reshoring	Pemulangan kegiatan produksi dari luar negeri ke negara asal.
Standar karbon	Persyaratan pengukuran dan pembatasan emisi yang melekat pada produk, proses, atau perdagangan.

Daftar Pustaka

- Asmarani, A. A., Trinugroho, I., & Suryanto. (2023). SMEs' flight to digital and green economy: Evidence from Indonesia. *International Journal of Business and Society*, 24(1).
<https://doi.org/10.33736/ijbs.5622.2023>
- Badan Pusat Statistik. (2025). The Gini ratio in March 2025 was 0.375.
<https://www.bps.go.id/en/pressrelease/2025/07/25/2519/the-gini-ratio-in-march-2025-was-0-375.html>
- Badan Pusat Statistik. (2026). Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen.
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2546/ekonomi-indonesia-tahun-2025-tumbuh-5-11-persen.html>
- Farida, N., Suman, A., & Sakti, R. K. (2021). Fiscal decentralization, economic growth and regional development inequality in Eastern Indonesia. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 9(2). <https://doi.org/10.21776/ub.jiae.009.02.1>
- Hanifah, H., & Yulhendri, Y. (2022). Human capital, kebijakan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi: Analisis evidence di Indonesia. *Jurnal Salingka Nagari*, 1(1), 78–92.
<https://doi.org/10.24036/jsn.v1i1.11>

- International Monetary Fund. (2026). Indonesia: 2025 Article IV consultation—Press release; staff report; and statement by the Executive Director for Indonesia (IMF Country Report No. 26/010). <https://www.imf.org/en/publications/cr/issues/2026/01/21/indonesia-2025-article-iv-consultation>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2023). Luncurkan rancangan akhir RPJPN 2025–2045, Presiden paparkan Visi Indonesia Emas 2045. <https://www.bappenas.go.id/index.php/berita/luncurkan-rancangan-akhir-rpjpn-2025-2045-presiden-paparkan-visi-indonesia-emas-2045-c29Ju>
- Mursalin, D., & Irawan, T. (2025). Balancing regional growth, equity, and spatial: The dilemma of decentralization in Indonesia's development. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 14(1), 58–82. <https://doi.org/10.29244/jekp.14.1.2025.58-82>
- Nursari, A., & Pratama, A. D. (2025). Middle income trap di Indonesia: Peran dan tantangan sektor ekonomi dalam mendorong pertumbuhan berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 5(1). <https://doi.org/10.47709/jebma.v5i1.5796>
- Rohmy, A. M., & Nihayaty, A. I. (2023). Green economy policies in the digital transformation of forest management in Indonesia. *Environmental Policy and Law*, 53(4). <https://doi.org/10.3233/EPL-230026>
- Suwanan, A. F., & Sulistiani, E. H. (2014). Fiscal decentralization and regional disparities in Indonesia: A dynamic panel data evidence. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 29(1). <https://doi.org/10.22146/jieb.6310>
- Tobing, C. R. E. (2011). The significant contribution of Indonesian human capital to the economic growth. *International Research Journal of Business Studies*, 4(1), 49–57. <https://doi.org/10.21632/irjbs.4.1.49-57>
- World Bank. (2020). *Aspiring Indonesia: Expanding the middle class*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/33237>
- World Bank. (2023). *Indonesia country climate and development report*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/39750>
- World Bank. (2024). *Indonesia economic prospects: Unleashing Indonesia's business potential*. World Bank. <https://www.worldbank.org/indonesia>
- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005). Institutions as a fundamental cause of long-run growth. In P. Aghion & S. N. Durlauf (Eds.), *Handbook of economic growth* (Vol. 1A, pp. 385–472). Elsevier. [https://doi.org/10.1016/S1574-0684\(05\)01006-3](https://doi.org/10.1016/S1574-0684(05)01006-3)
- Hausmann, R., & Hidalgo, C. A. (2011). The network structure of economic output. *Journal of Economic Growth*, 16(4), 309–342. <https://doi.org/10.1007/s10887-011-9071-4>
- Melitz, M. J. (2003). The impact of trade on intra-industry reallocations and aggregate industry productivity. *Econometrica*, 71(6), 1695–1725. <https://doi.org/10.1111/1468-0262.00467>
- Rodrik, D. (2008). *Normalizing industrial policy*. Commission on Growth and Development Working Paper No. 3. World Bank. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1244367>
- World Intellectual Property Organization. (2025). *Global innovation index 2025: Innovation at a crossroads*. WIPO. <https://doi.org/10.34667/tind.58864>